

**YAYASAN LEMBAGA PEDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI LURAH DALAM
PEMBINAAN LEMBAGA KELURAHAN DI PERAWANG
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



Charisma

Npm : 147310107

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

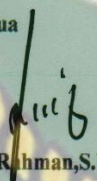
PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Charisma
NPM : 147310107
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
Di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 27 Januari 2021

Ketua


Dr. Kairul Rahman, S.IP, M.Si

Sekretaris


Yendri Nazir, S.Sos, M.Si

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau
Wakil Dekan I


Indra Satri, S.Sos., M.Si

Menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Ip., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

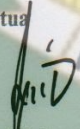
PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Charisma
NPM : 147310107
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
Di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak

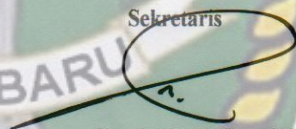
Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai,relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian Ilmiah, oleh karena itu Tim penguji Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poilitik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana

Pekanbaru, 27 Januari 2021


Ketua


Dr. Kairul Rahman,S.IP , M.Si

Sekretaris


Yendri Nazir S.sos M.si

Anggota


Andriyus S. Sos M.Si

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau
Wakil Dekan I


Indra Safri S.sos M.si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Charisma
NPM : 147310107
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
Di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak.


Format Sistematika Dan Pembahasan Masing-Masing Materi Bab Dan Sub-Sub Dalam Skripsi Ini, Telah Dipelajari Dan Dinilai Relatif Telah Memenuhi Ketentuan-Ketentuan Normatif Dan Kreteria Metode Penelitian Ilmiah, Oleh Karena Itu Dinilai Layak Serta Dapat Disetujui Dalam Sidang Ujian Konferhensif.

Pekanbaru, 27 Januari 2021

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H.M. Hum

Pembimbing II


Yendri Nazir, S.Sos M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian., M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Perumusan masalah	16
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	16
1. Tujuan penelitian	16
2. kegunaan penelitian	16
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN	
A. Studi kepustakaan	
1. Pemerintahan	18
2. Kebijakan Publik	20
3. Konsep teori evaluasi	22
4. Teori fungsi	24
5. Konsep Kelurahan	25
6. Teori pembinaan.....	27
7. Konsep lembaga permasyarakatn	30
B. Kerangka pemikiran	46
C. Hipotesis.....	48
D. Konsep oposional	48
E. Oprasional variabel	51

F. Teknik pengukuran	52
----------------------------	----

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian	55
B. Lokasi penelitian	55
C. Populasi dan sampel.....	55
1. Populasi.....	56
2. Sampel.....	56
D. Teknik penarikan sampel	56
E. Jenis dan sumber data	57
F. Teknik pengumpulan data	57
G. Teknik analisis data	58
H. Jadwal waktu penelitian	59
I. Rencana usulan Penelitian.....	60

BAB 1V : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Perawang	62
B. Gambaran Umum Kelurahan Perawang	63
C. Struktur Organisasi Kantor Kelurahan perawang	69

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden.....	70
B. Hasil dan Pembahasan Pembinaan di Kelurahan.....	72
1. Penyuluhan.....	73
2. Pengarahan	78

3. Bimbingan	82
C. Hambatan-Hambatan tugas lurah Dalam pembinaan di Kelurahan perawang	89

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	91
B. SARAN.....	92

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN LAMPRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Nama dan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Perawang Kecamatan Siak Kabupaten Siak.....	11
I.2 Program Pembinaan RT dan RW Di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2018.....	12
II. 2 oprasional variabel.....	51
III. 1 Jumlah penarikan populasi dan sampel.....	56
III. 2 Jadwal waktu penelitian.....	59
IV. 5 Jumlah penduduk Klurahan perawang menurut tingkat pendidikan akhir pada tahun 2018.....	65
V. 1 Karakteristik Responden (Pegawai) Menurut Tingkat Pendidikan.....	70
V. 2 Karakteristik Responden (Pegawai) Menurut Umur.....	71
V.3 tanggapan responden tentang penyuluhan	74
V.4 tanggapan responden tentang pengarahan	79
V.5 Tanggapan Responden tentang bimbingan	84
V.6 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan perawang kecamatan tualang kabupaten siak.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 Evaluasi Pelaksanaan fungsi lurah dalam pembinaan.....	47
IV.Bagan Susunan Organisasi kelurahan tualang kecamatan tualang kabupaten siak.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar pertanyaan Wawancara
2. Daftar pertanyaan kusioner
3. Dokumentasi penelitian
4. Data teli
5. Surat rekomendasi penelitian



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Charisma
NPM : 147310107
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah dalam
Pembinaan Lembaga Di Kelurahan Perawang
Kecamatan tualang kabupaten siak

Atas Naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (bukan Plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas, Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru,18 juli 2018

Pelaku pernyataan

Ozi Randica

ABSTRAK

EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI LURAH DALAM PEMBINAAN LEMBAGA DI KELURAHAN PERAWANG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK”.

(evaluasi) sebagai proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. evaluasi pelaksanaan tugas lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan Perawang kecamatan tualang maka dapat di kategorikan tidak baik yang di lihat dari antara lain pemberian bimbingan yang di lakukan lurah belum berjalan dengan baik karena tidak dilakukan secara rutin dan dalam memberikan pengarahan masih ada pengarahan yang kurang di mengerti oleh lembaga kemasyarakatan sehingga arahan yang di sampaikan tidak sesuai tidak maksimal jadinya, serta dalam memberikan pendidikan dan pelatihan selanjutnya dalam memberi intruksi-intruksi tidak jelasnya intruksi yang di sampaikan sehingga sering salah penerimaan oleh RT dan RW dan mengenai adanya literatur/buku lurah tidak ada memberikan buku petunjuk baru tetap menggunakan yang lama juga Dalam menjalankan tugas ini banyak hambatan yang di hadapi oleh lurah terutama dalam melakukan pembinaan terhadap RT/RW yang antara lain yaitu: kurangnya sarana dan prasarana seperti gedung pertemuan untuk mengadakan pendidikan dan latihan bagi seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada hal, tidak dipahaminya intruksi yang di berikan oleh lurah oleh lembaga kemasyarakatan yang di sebabkan rendahnya pemahaman dari anggota lembaga yang ada, tidak tersedianya dan khusus untuk membeli dan membuat buku petunjuk bagi RT/RW sehingga hanya bisa mengguna buku yang lama saja.

Kata kunci ; Evaluasi, Pelaksanaan

ABSTRACT

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF FUNCTIONAL FUNCTION IN THE DEVELOPMENT OF INSTITUTIONS IN THE TAWANG DISTRICT, TUALANG DISTRICT, SIAK REGENCY "

(evaluation) as a process of measuring and comparing the results of work that were actually achieved with the results that should have been achieved. did the village head not go well because it was not done routinely and in giving direction there was still a lack of guidance understood by the social institutions so that the directions conveyed were not appropriate to the maximum, and in providing further education and training in giving unclear instructions instructions are conveyed so that it is often wrong acceptance by RT and RW and regarding the existence of literature / book of lurah, there is no new manual to keep using the old one. In carrying out this task many obstacles faced by the lurah, especially in conducting coaching RT / RW adapts, which include: lack of facilities and infrastructure such as a meetinghouse to hold education and training for all existing social institutions, not understanding the instructions given by the lurah by the social institutions due to the low understanding of the members of the existing institutions , unavailability and specifically for buying and making manuals for RT / RW so that only old books can be used.

Keywords ; Implementation Evaluation

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis ucapkan kehadirat tuhan yang maha esa, karena dengan kebesarannya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini merupakan ialah satu syarat pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Untuk memperoleh gelar sarjana di Faskultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru. Dengan judul:

“Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah dalam Pembinaan lembaga di kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga bagi semua pihak yang membantu dan memberikan semangat serta dorongan yang bersifat matrial maupun spritual terutama penulis menyampaikan kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif ,M.Si sebagai dekan Faskultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP,M.Si sebagai ketua jurusan Ilmu pemerintahan Faskultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH.M.hum sebagai dosen pembimbing I yang telah banyak membantu dalam memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.

5. Bapak Yendri Nazir S.Sos M.Si sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dalam memberikan arahan kepada penulis dalam Skripsi ini.
6. Seluruh dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan semua ilmu yang di miliki kepada penulis.
7. Terimakasih pada ayahanda I dan ibunda atas doa restu yang Tak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat,motivasi dan melimpahkan pahkan kasih sayang yang tiada henti.
8. Terima kasih Teman seperjuangan Eko Papindri Haryono,. Rohim. Juandi Palos, Marwan, Hendrika Rachel, Muhamad Sukri dan rekan rekan IP B yang telah banyak meluang kan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.Terimaksih juga kepada para sahabat dan rekan rekan sepermainan yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini. Penulis berharap semoga Skripsi yang penulis kerjakan mendapat keridhoan dari ALLAH SWT, dan berguna bagi penulis semdiri serta bermanfaat bagi para pembaca dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, amin.

Penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dimana daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dibentuknya pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa pemerintahan pusat selanjutnya disebut dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) nya yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPR menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sampai

sekarang ini masih berlaku kedudukan desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan yang paling rendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kedudukan kecamatan diatur dalam pasal 221, sementara kelurahan dibentuk dan diatur dalam pasal 229 dikatakan kelurahan dibentuk dengan perda kabupaten/kotaberpedoman pada peraturan pemerintah.

Selanjutnya dalam pasal 229 ayat (2) dikatakan kelurahan di pimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Selanjutnya dalam pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ayat (3) Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan dalam pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ayat (4) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
- h. Peraturan undang-undang.

Kelurahan sebagai satuan administrasi pemerintahan terendah yang berkedudukan dibawah kecamatan yang merupakan wilayah pelayanan administrasi yang sangat dekat dengan masyarakat. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang merupakan dasar menuju masyarakat yang berkembang yaitu kelurahan tidak lagi menjadi level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi masyarakat yang mandiri. Sehingga setiap masyarakat yang berada pada lingkungan kelurahan berhak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan kepentingan sendiri. Disini harus dipahami bahwa kelurahan merupakan suatu kesatuan hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan melayani semua kebutuhan dan kepentingan masyarakat menuju kesejahteraan.

Pemerintah kelurahan juga harus cepat dan tanggap dalam memperhatikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan warga masyarakat. Diharapkan dengan terciptanya pemerintah kelurahan yang tangguh dan mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dapat mewujudkan program-program pembangunan yang terencana secara efektif dan efisien yang ada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan sejahtera.

Dan itu juga tertuang dalam Undang undang 23 pasal 229 ayat 4 lurah mempunyai tugas

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan di selikungan kelurahan
- b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat

- d. Memelihara ketertiban dan ketentraman umum
- e. Melaksanakan tugas lain dari camat
- f. Dan melaksanakan tugas lain sesuai perundang undangan

6. Pembinaan kelembagaan Kemasyarakatan Rt dan Rw

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

Susunan organisasi pasal 6 terdapat :

1. Kelurahan terdiri dari lurah dan perangkat kelurahan.
2. Perangkat kelurahan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) terdiri dari sekretaris kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab pada lurah.
4. Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diisi dari pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul camat.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala daerah, dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas :

1. Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. Tertib Penyelenggara Negara

Tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

3. Kepentingan Umum

Asas tersebut merupakan asas yang mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.

5. Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.

6. Profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat

atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Efisiensi

Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara mencapai hasil kerja yang terbaik.

9. Eektivitas

Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

10. Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

Selanjutnya dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa salah satu yang menjadi fungsi pemerintah kelurahan adalah "Pembinaan Lembaga kemasyarakatan" yang mana pembinaan lembaga kemasyarakatan dalah salah satu yang menjadi bahan penelitian. Pengertian istilah kelembagaan kemasyarakatan dalam bahasa Inggris adalah social institution, namun social institution juga diterjemahkan sebagai pranata sosial.Lembaga Kemasyarakatan adalah jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi pemelihara hubungan itu serta pada pola-polanya sesuai dengan minat dan kepentingan individu dan kelompoknya. Lembaga kemasyarakatan adalah tata cara kehidupan kelompok dengan apabila dilanggar akan di jatuhi derajat atau sangsi.

Soekato, (1982:173) bahwa lembaga Kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai fungsi :

- a. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
- b. Menjaga keutuhan masyarakat.
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan system pengendalian sosial (*social control*) artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku.

Dengan adanya Lembaga Kemasyarakatan dimaksudkan untuk dapat memelihara dan melestarikan nilai goto royong, menumbuh kembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu pelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pembinaan lembaga Kemasyarakatan merupakan sebuah kegiatan yang harus ada, yang mana tujuannya yaitu membimbing atau melatih lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan, seperti memberikan rukun tetangga dan rukun warga tentang administrasi, sehingga tidak terjadi kesalahan, serta dapat meningkatkan potensi masyarakat agar lebih novatif dan berkarya sesuai dengan kemampuan yang di miliki masyarakat

Didalam lembaga Kemasyarakatan salah satu lembaga RT/RW ini yang mana pembinaan lembaga Kemasyarakatan khususnya yang menjadi salah satu

fokus peneliti. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan ini di lakukan terhadap setiap kelembagaan yang ada di Kelurahan Perawang dan terdiri dari RT/RW, PKK, Karang Taruna hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dari lembaga Kemasyarakatan yang ada.

Dari sejumlah fungsi yang menjadi tanggung jawab seorang lurah maka ini menggambarkan bahwa ruang lingkup kegiatan lurah di samping tugas-tugas lain, yakni melaksanakan sejumlah tugas pokok yang dijelaskan padapasal 3 Peraturan Pemerintah. Nomor 73 Tahun 2005 menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dari sejumlah fungsi tersebut yang menjadi tanggung jawab seorang lurah maka ini menggambarkan bahwa ruang lingkup kegiatan lurah disamping tugas-tugas lain, yakni melaksanakan sejumlah wewenang yang di limpahkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pada pasal 4 ayat (2) yang mana fungsinya sebagai berikut :

- a. Penanmpungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta;
- d. Pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya;
- g. Serta keserasian lingkungan hidup;
- h. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- i. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- j. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- k. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/ kelurahan dan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan pasal 14, RT/RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintahan Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan.

Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan, RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud dalam pasal 13 mempunyai fungsi :

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keaman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong-royong dan pratisipasi masyarakat diwilayahnya.

Santoso (1995:52) Pentingnya pembinaan dilakukan karena selain pemerintahan memerlukan lembaga Kemasyarakatan dalam mendukung program pembangunan pemerintahan baik dalam pembangunan fisik dan non fisik, juga kelembagaan-kelembagaan.

Kemasyarakatan yang ada baik di desa atau kelurahan bukanlah lembagayang betul-betul timbul dari masyarakat desa atau Kelurahan tersebut, Karena itu perlu pembinaan sebagai usaha memelihara dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi.

Pentingnya pembinaan yang dikemukakan oleh Santoso sudah jelas bahwa pembinaan merupakan suatu kegiatan untuk membimbing atau melatih agar sasaran dalam pembinaan dalam hal ini Kelembagaan Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan seperti RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna dan lain-lain bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat Kelurahan Kampung Perawang itu sendiri, sehingga nantinya menunjang akan pembangunan guna mensejahterakan kehidupan masyarakat di Kelurahan itu sendiri. Di kelurahan Kampung Perawang terdapat LembagaKemasyarakatan yang mendapat perhatian untuk dibina, adapun lembaga tersebut yang terdapat di Kelurahan Perawang yaitu :

Tabel I.I Nama dan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Perawang Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

No	Nama Kelembagaan Kelurahan Kampung Perawang	Jumlah
1.	PKK	1
2.	LPM	1
3.	Karang Taruna	1
4.	Rukun Warga	8
5.	Rukun Tetangga	91
Jumlah		102

Sumber : Kantor Lurah Kampung Perawang, 2020

Dari Tabel I.I diatas dapat dijelaskan bahwa organisasi Kemasyarakatan yang terdapat di Kelurahan Perawang yang terbanyak adalah kelembagaan Rukun Tetangga sebanyak 91 jumlah dan Rukun Warga sebanyak 8 keberadaan kelembagaan RT/RW ditengah-tengah masyarakat anggap sangat penting karena lembaga ini berperan sebagai Lembagasosial yang diperlukan.

Selain itu, sesuai dengan tugas lurah yang dijelaskan sebelumnya dungsi lurah diantaranya melakukan Pembinaan lembagaKemasyarakatan, dari data yang penulis dapatkan di kelurahan Kampung Perawang juga memiliki program pembinaan RT/RW oleh lurah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel I.1 Program Pembinaan RT dan RW Di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2018

NO	HARI/TANGGAL	Agenda Pertemuan	Lokasi
1.	Senin 07/05/2018	Melakukan Penyuluhan Kepada RT/RW tentang Keamanan	Aula Kantor Lurah perawang
2.	Rabu 16/05/2018	Membirakan Arahan Pembinaan Tentang tata cara pembuatan administasi kependudukan	Aula Kantor Lurah Perawang
3.	Kamis 24/05/2018	Lurah memberikan Pengarahan Kepada Rt dan Rw dalam menjaga kebersihan lingkungan seperti gotong-royong	Aula Kantor Lurah Perawang

Sumber : Kantor Kelurahan Perawang, 2020

Dari tabel I.2 diatas dapat dijelaskan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Lurah Perawang kepada RT/RW masih bersifat umum yaitu hanya pertemuan rutin lurah dengan ketua RT/Rw. Walaupun demikian, kejahatan-kejahatan sosial masih juga sering terjadi dan pelanggaran ketertiban umum masih juga ada. Dari pertemuan rutin bulan ini masih terdapat juga ketua RT/RW yang tidak dapat hadir.

Hal ini menunjukkan bahwa. Kurang dinamisnya kegiatan Lembaga RT/RW yang ada di Kelurahan Perawang. Bila kita kaji mendalam, lurah merupakan sebagai pejabat yang diberi otoritas untuk melakukan tugas-tugas pembinaan terhadap lembaga-Lembaga kemasyarakatan tersebut sebagai sumber daya guna mempercepat tercapainya masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera.

Rukun Tetangga menurut pasal 11 butir 3 Kepres Nomor 49 tahun 2001 yaitu Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga

yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa dan kelurahan.

Menurut Rauf (2005:42) tujuan pembentukan Rukun Tetangga untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan, dimana gotong royong dan kekeluargaan merupakan sendi-sendi utama dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Sedangkan menurut Rauf (2005:97) pengertian Rukun Warga adalah rukun warga merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat setempat, dan bukan termasuk pemerintah, pemerintah dalam hal ini hanya berfungsi mengakui kelembagaan rukun warga tersebut selanjutnya dibina oleh pemerintah kota/kabupaten yang dalam hal ini adalah kelurahan.

Kemudian dijelaskan Rauf, (2005:98) adapun maksud dan tujuan dibentuknya RW adalah membantu pemerintah kota dalam memperlancarkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan, serta menghimpun seluruh potensi dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan.

Jika kita melihat fakta yang terjadi pada saat ini, keberadaan kelembagaan RT/RW sangat penting karena mengingat peran-nya yang begitu besar dalam kehidupan sosial masyarakat.

Masalah sosial yang terjadi saat ini seperti halnya tindakan kriminal, yang sering terjadi. Seperti adanya warga dari masyarakat yang memproduksi narkoba, berkembangnya paham radikalisme dan aliran sesat di tengah-tengah masyarakat serta isu-isu teroris, yang mana saat ini begitu meresahkan masyarakat, dan itu

tidak terlepas dari peran Kelembagaan RT dan RW yang lalai dalam mengawasi masyarakat sekitarnya.

Kelurahan Perawang Letaknya lebih kurang 1 jam menuju ibu kota provinsi (Pekanbaru) dan 1,5 jam menuju ibu kota kabupaten (Siak sri indrapura). Wilayah lain yang berbatasan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Kecamatan dengan Mandau, Minas
2. Sebelah Selatan Kecamatan dengan Krinci Kanan, Pelalawan
3. Sebelah Barat dengan Kecamatan Minas
4. Sebelah Timur Kecamatan sei mandau dengan kecamatan kota gasib

Selain melakukan kerja sama dengan berbagai instansi dalam membangun kegiatan masyarakat Kelurahan Perawang, kegiatan lurah yang lain adalah melakukan pembinaan terhadap Lembaga-Lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan sebagai salah satu tugas lurah dalam melaksanakan tugas pemerintahan karena bila pembinaan terhadap lembaga-lembaga Kemasyarakatan berhasil, maka tugas Pemerintahan Kelurahan semakin karena dibantu oleh lembaga Kemasyarakatan yang ikut bersama Pemerintahan Kelurahan menjalankan kegiatan pembangunan.

Harus dilakukan oleh ketua RT/RW supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya, dan Bimbingan lurah terhadap ketua RT/RW adalah pedoman dan motivasi agar lembaga RT/RW di Kelurahan Perawang dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam data yang dapat diperoleh penulis dapat menyimpulkan sejumlah fenomena-fenomena yang terdapat di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak :

1. Terindikasi kurang tanggapnya RT/RW dalam melaksanakan fungsi keamanan lingkungan, hal ini dapat dilihat masih adanya di wilayah kerja RT/RW seperti di lingkungan sukasari tidak terdapatnya pos ronda.
2. Terindikasi kurang efektifnya beberapa kelembagaan RT/RW dalam melaksanakan fungsi keamanan lingkungan sukasari dan lingkungan permai terutama Sistem Keamanan Lingkungan “SISKAMLING”, dapat dilihat dari kurang aktifnya sebagian warga masyarakat yang mengikut jadwal siskamling secara bergiliran yang telah di atur oleh ketua RT. Hal ini dapat dilihat juga masih ada di wilayah kerja RT/RW tidak adanya pos ronda, dampak yang terjadi bila tidak adanya hal tersebut maka tingkat pencurian dan kehilangan maupun hal-hal yang menyimpang di kelurahan pasti akan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Terindikasi kurangnya pembinaan lurah di Kelurahan Perawang terhadap RT/RW dalam memberikan pengarahan untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, dan bergotong royong bersama dikarenakan masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarang dan juga terdapat spot-spot semak berlukar di dalam lingkungan permai.

Berdasarkan dari fenomena diatas untuk lebih lanjut sejauh mana pelaksanaan Lurah Dalam Pembinaan RT/RW, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah dalam**

Pembinaan lembaga di kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian ini adalah **“Bagaimana Hasil Pelaksanaan dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?”**

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan lembagaKemasyarakatan di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
 - b. Untuk mengetahui dan menejelaskan faktor penghambatan dari Pelaksanaan Fungsi lurah dalam Pembinaan lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Perawang Kecamatan TualangKabupaten Siak.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Guna teoritis, yakni Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya mengenai Pelaksanaan Fungsi lurah dalam Pembinaan lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

- b. Guna praktis, yakni Sumbang pikir mahasiswa dan mahasiswi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada umumnya di jurusan Ilmu Pemerintahan khususnya terutama dalam pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan.
- c. Guna akademis,yakni Sebagai bahan bandingan bagi rekan-rekan mahasiswa untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi Lurah dalam bidang kemasyarakatan.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan menurut H.A Brasz dalam syafie (2011:62-63) adalah ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan di fungsikan baik secara ke dalam maupun ke luar terhadap warganya.

Menurut Ndraha, (2010:4) Dari beberapa negara , antara Pemerintah dan Pemerintahan tidak dibedakan, Inggris menyebutnya “Government” dan Prancis menyebutnya “Government”. Dalam bahasa Arab “Hukumat”. Di Amerika Syarikat disebut “Administration”, sedangkan Belanda “Regering” sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan negara, dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah. Ndraha (2003:5) Pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi kebutuhan tuntutan yang diperintah atas jas publik dan layanan sipil.

Sedangkan Pemerintah adalah yang berwenang memproses layanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah.

Ndraha, (2003:6) Pemerintahan adalah orang-orang yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota

masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan sesuai dengan tuntunan yang diperintah.

Ndraha, (2003:7) Kemudian yang disebut pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan, sesuai dengan tuntunan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia wajib melayangkannya.

Dari penjelasan diatas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan terbagi menjadi 3 fungsi, yaitu :

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan
- c. Fungsi pelayanan

Menurut Ndraha, (2003) lebih lanjut bahwa yang dikatakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntunan setiap orang terhadap jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dalam menyelenggarakan pemerintahan Wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah seperti penjelasan undang-undang dasar 1945.Oleh kerana itu dalam melaksanakan roda

pemerintahannya, pemerintah pusat dibantu oleh daerah, sehingga masalah-masalah pemerintahan tidak hanya terbebani oleh pemerintahan pusat saja.

Menurut Muhammad Hatta, pembentukan pemerintahan daerah (pemerintahan yang berotonomi) merupakan salah satu aspek pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi). Menurut dasar kedaulatan rakyat, hak rakyat menentukan nasibnya tidak hanya pada pucuk pimpinan negeri, tetapi juga pada setiap tempat di kota, desa dan daerah, Dalam Rosidin, (2010:39).

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip, Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah).

Konsep Pemerintahan menurut UNDP dalam Yusri Munaf (2016;86) menjelaskan bahwa Pemerintahan diterjemahkan menjadi tata pemerintahan yaitu penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatangi perbedaan-perbedaan di antara mereka.

2. Kebijakan Publik

Menurut Boediardjo (2009:20) Kebijakan adalah Keputusan yang di ambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-

kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan (Nugroho,2008:55).

Kebijakan publik menurut Prewitt (dalam Putra, 2014:14) sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsisten dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari yang mematuhi keputusan tersebut, selanjutnya menurut Dye (dalam Putra,2014: 15) sebagai kebijakan publik apa yang dipilih oleh pemerintah untuk di kerjakan atau tidak di kerjakan. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui bahwa terdapat perbedaan antara apa yang di kerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

Menurut William N Dunn (2013:03) metodologi analisis kebijakan diambil dari dan memadukan elemen-elemen dari berbagai disiplin : Ilmu Politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, filsafat. Analisis kebijakan sebagian bersifat deskriptif, diambil dari disiplin-disiplin tradisional (misalnya, ilmu politik) yang mencari pengetahuan tentang sebab dan akibat dari kebijakan-kebijakan publik namun analisis kebijakan juga bersifat normatif. Tujuan lainnya adalah menciptakan dan melakukan kritik terhadap klaim pengetahuan tentang nilai kebijakan publik untuk generasi masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Aspek normatif atau kritik nilai dari analisis kebijakan ini terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mencakup

dinamika antara variabel tergantung (tujuan) dan variabel bebas (cara yang sifatnya valuatif.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan publik serta mencapai tujuan negara. Khususnya dalam mencapai tujuan negara yaitu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mana pemerintah membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan dibantu oleh aparat pemerintah pusat maupun daerah. Setelah kebijakan tersebut disahkan sebagai sebuah peraturan yang berlaku maka untuk melaksanakan suatu kebijakan yang biasanya disebut implementasi kebijakan.

3. Konsep/Teori Evaluasi

Nurcholis (2005:67) menyatakan evaluasi merupakan penilaian secara menyeluruh dari input, proses outputs dan outcomes melalui evaluasi dapat di ketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak. Menurut tangkisan (2003:8), walaupun pengukuran evaluasi tersebut bervariasi, secara umum kinerja dari evaluasi tersebut mengacu empat indikator yakni indikator input, proses, outputs, dan outcomes. Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang di perlakukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator input ini dapat meliputi sumberdaya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.

Indikator Proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektifitas dan efisiensi dari metode atau cara yang di

pakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu. Efektifitas menurut Dunn(2000:610) dalam pengevaluasiannya harus bisa menjawab apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas lebih melihat kepada hasil atau tujuan yang hendak di capai sedangkan efisiensi melihat kepada berbagai usaha yang di lakukan untuk mencapai hasil yang di inginkan

Nurcholis (2005:67) indikator (hasil), memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya beberapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu, demikian seterusnya. Dan terakhir indikator outcomes(dampak), memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan

Siagian (2003:17) memberikan batasan penilaian (evaluasi) sebagai proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyata dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.

Ndraha (2003:201) Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Terdapat berbagai model evaluasi, satu diantaranya menurut ndraha adalah :

A) Model before-after yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku treatment) tolak ukurnya adalah before :B) model das solen-das sein yaitu perbandingan antara yang seharusnya denganyang senyatanya ;C) Model kelompok control-kelompok tes (diberi perlakuan) Menurut Dunn (1999:608) mememukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan :

- a. Efektifitas yaitu apakah hasil yang di inginkan telah tercapai.
 - b. Efisiensi yaitu beberapa banyak usaha yang di perlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
 - c. Kecakupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang di inginkan memecahkan masalah.
 - d. Pemerataan yaitu apakah biaya yang manfaatnya didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.
 - e. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan prefensi atau nilai-nilai kelompok tertentu.
 - F. Ketepatan yaitu apakah hasil (tujuan) yang di capai memiliki manfaat.
- Menurut Ndraha (2003:201) juga menyatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya.

4. Teori Fungsi

Moerir, (2010:24) fungsi adalah rincian-rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksana-nya. Pengertian fungsi menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, layak guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Thoha, (2011:76) tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus ditambahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota prganisasi atau pegawai dan suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat bedasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

5. Konsep Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah Sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kelurahan dijelaskan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja kecamatan, sedangkan lurah adalah kepala kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dungsi lurah adalah segala tindakan, kegiatan dan segala aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh lurah dalam menjalankan urusan-urusan Pemerintah di Wilayah Kelurahan. Adapun tugas lurah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan yaitu dalam pasal 4 ayat (1) ditegaskan bahwa lurah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan fungsi lurah adalah :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;

- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan.

Kansil, (2003:190) mendefinisikan kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterampilan dalam mencapai tujuan tertentu. Sutopo, (2001:10) kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang diajukan untuk kepentingan masyarakat, kebijakan public bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat.

Nugroho, (2006:25) kebijakan public adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan public, bukan kehidupan orang atau golongan. Kebijakan (*policy*) dalam pemerintahan hendaknya dibedakan dengan kebijakan (*wisdom*) karena kebijakan merupakan aturan yang sudah di tetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang.

Inu Kencana Syafie, (1999:105) disamping itu kebijakan (*policy*) dapat juga kita katakan atau kita pergunakan untuk menuju perilaku seseorang actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu kelembagaan pemerintah) ataupun sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu.

Dunn, Wiliam N (2003:22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan pelbagai serangkaian tahap yang

saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penelitian kebijakan.

6. Teori Pembinaan

Miftah Thoha, (1997:8) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu . Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupaya suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Santoso, (1995:52) Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pembinaan disiplin kerja pegawai adalah rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan sikap kesediaan pegawai menanti peraturan berlaku.

Menurut Santoso, (1995:60) pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain sebagai :

1. Penyuluhan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata penyuluh berasal dari kata suluh yang berarti barang yang dipakai untuk media penerangan atau obor. Sedangkan penyuluh adalah barang yang bertugas memberikan penerangan dan penunjuk jalan. Sehingga makna arti dalam kata penyuluhan adalah suatu proses atau cara yang dilakukan oleh penyuluhan untuk memberikan penerangan atau informasi kepada orang lain semula yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tahu menjadi

lebih tahu. Penyuluhan adalah kegiatan yang dilakukan oleh dalam membekali anggota/perangkat kelembagaan agar mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun faktornya adalah :

- a. Membuat program penyuluhan
 - b. Adanya pertemuan, diskusi dan musyawarah yang dibuat Lurah untuk pembahasan suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama
 - c. Melaksanakan program yang telah diatur.
 - d. Mengevaluasi program dari hasil tersebut.
2. Pengarahan

Menurut Saure dan Dislainer dalam Wanadiana (2010) pengarahan merupakan petunjuk untuk melaksanakan sesuatu atau perintah resmi seseorang pimpinan kepada bawahannya berupaya petunjuk untuk melaksanaka sesuatu. Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan lurha untuk memberi arahan, petunjuk atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kelembagaan kemasyarakatan supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun indikatornya adalah :

- a. Memberikan arahan yang berhubungan dalam bidang pemerintahan
- b. Mengumpulkan setiap penyelenggaraan pemerintahan desa

3. Bimbingan

Menurut Sunaryo Kartadinata (1998) bimbingan adalah proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. Sebuah bimbingan harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam melakukan bimbingan, harus dilakukan secara stematis dan terarah supaya tercapai tujuan

yang di inginkan. Bimbingan merupakan usaha-usaha yang diulakukan Lurah untuk mengajak, mengiring serta mendorong agar lembaga Kemasyarakatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun indikatornya adalah :

- a. Kegiatan yang dilakukan atau diikuti oleh semua anggota RT/RW diberikan secara tertulis
- b. Peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dengan kegiatan tersebut
- c. Adanya diskusi atau tanya jawab antara pembimbing dan yang dibimbing

Thoha, (2002:7) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal pembinaan ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang dan perubahan atas sesuatu.

Menurut Manullang, (2009:11) pembinaan adalah usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan-nya dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

Ndraha, (1991:166) istilah pembinaan menunjukkan antara lain : pengarahan, pengaturan dan pengisian. Sedangkan pembinaan pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 26, meliputi :

- a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga Kemasyarakatan
- b. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif

- c. Menetapkan bantuan pembiayaan biaya alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga Kemasyarakatan
- d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta peberdayaan lembaga Kemasyarakatan
- e. Melakukan pembinaan pengawasan penyelenggaraan lembaga Kemasyarakatan
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga Kemasyarakatan
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga Kemasyarakatan.

7. Konsep lembaga Kemasyarakatan

Soekanto (dalam Raharjo, 2004:162) mengatakan lembaga Kemasyarakatan adalah suatu sistem tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas dalam masyarakat. Sedangkan menurut Koentjaraningrat (dalam raharjo, 2004:162) pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-komplek kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.

Raharjo, (2004:162) dari ketiga definisi diatas jelas tersirat suatu pengertian bahwa lembaga itu adalah suatu sistem atau kompleks nilai dan norma. Sistem nilai dan norma atau tata kelakuan ini berpusat disekitar kepentingan atau tujuan tertentu sehingga kompleks nilai dan norma yang ada pada berbagai lembaga menjadi berbeda pula seiring dengan perbedaan kepentingan yang akan dicapai lewat kelembagaan-kelembagaan tersebut. Selanjutnya Soekanto (2002:197) menjelaskan lembaga Kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing *social-institution*. Akan tetapi hingga kini belum ada

kata sepakat mengenai istilah Indonesia apa yang dengan tepat menggambarkan isi *social- institution* tersebut. Ada yang menggunakan istilah “pranata sosial”, tetapi *social-institution* menunjukkan pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Misalnya Koentjaraningrat mengatakan pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-komplek kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut menekankan pada sistem tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan. Istilah lain yang diusulkan adalah “bangunan sosial” yang mungkin merupakan terjemahan dari *Soziale-Gebilde* (bahasa Jerman) yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan susunan *social-institution* tersebut.

Adapun ciri-ciri umum menurut Gilin (dalam Soekanto, 2002:209) didalam karyanya yang berjudul “General features of social institution” adalah sebagai berikut :

1. Suatu lembaga Kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktifitas-aktifitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. lembaga Kemasyarakatan terdiri dari adat-istiadatnya, tata kelakuan, kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung mampu tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional.
2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri-ciri dari semua lembaga Kemasyarakatan. Sistem-sistem kepercayaan ada aneka macam tindakan, baru akan menjadi lembaga Kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relative lama. Misalnya, suatu sistem pendidikan tertentu baru akan dapat diterapkan

seluruhnya setelah mengalami suatu masa percobaan. lembaga-lembaga Kemasyarakatan biasanya juga berumur lama, karena pada umumnya orang menganggapnya sebagai himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok kemasyarakatan yang sudah sewajarnya harus dipelihara.

3. lembaga Kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Mungkin tujuan-tujuan tersebut tidak sesuai atau sejalan dengan fungsi lembaga yang bersangkutan pembedaan antara tujuan dengan fungsi sangat penting oleh karena tujuan suatu kelembagaan adalah tujuan pula bagi golongan masyarakat tertentu dan golongan masyarakat bersangkutan pasti akan berpegang teguh padanya. Sebaliknya, fungsi social kelembagaan tersebut yaitu peranan kelembagaan tadi dalam system social dan kebudayaan masyarakat, mungkin fungsi tersebut baru disadari setelah diwujudkan dan kemudian ternyata berbeda dengan tujuannya. Umpama kelembagaan perbudakan, ternyata tujuan tersebut untuk mendapatkan tenaga buruh yang semurah-murahnya. Tetapi di dalam pelaksanaan ternyata sangat mahal.
4. lembaga Kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang di pergunakan untuk mencapai tujuan Kelembagaan Kemasyarakatan, seperti bangunan, peralatan, mesin dan lain sebagainya : Bentuk serta penggunaan alat-alat tersebut biasanya berlainan antar satu masyarakat dengan masyarakat ini. Misalnya, gergaji Jepang dibuat sedemikian rupa sehingga alat tersebut akan memotong apabila ditarik. Sebaliknya gergaji Indonesia baru memotong apabila didorong.
5. lembaga-lembaga biasanya juga merupakan ciri khas dari lembaga Kemasyarakatan. lembaga-lembaga tersebut secara simbolis menggambarkan

tujuan dan fungsi kelembagaan yang bersangkutan. Sebagai contoh kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata, masing-masing mempunyai panji-panji; perguruan-perguruan tinggi seperti universitas, institute dan lain-lain lagi. Kadang-kadang lambang tersebut berwujud tulisan-tulisan atau slogan-slogan.

6. Suatu lembaga Kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun tak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan lain-lain. Tradisi tersebut merupakan dasar bagi kelembagaan itu di dalam pekerjaannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, dimana lembaga Kemasyarakatan tersebut menjadi bagiannya.

Lebih lanjut, Gillin (dalam Soekanto, 2002:211-212) mengklasifikasikan tipe-tipe lembaga Kemasyarakatan antara lain sebagai berikut :

1. *Creascive institution* dan *enacted institution* yang merupakan klasifikasi ari sudut perkembangannya. *Creasive institution* yang juga disebut kelembagaan-kelembagaan paling primer, merupakan lembaga-lembaga yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat-istiadat masyarakat. Contohnya adalah hak milik, perkahwinan, agama dan seterusnya. *Enacted institution* dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya lembaga hutang piutang, lembaga perdagangan dan lembaga-lembaga pendidikan yang kesemuanya berakar pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat.

Pengalaman melaksanakan kebiasaan-kebiasaan tersebut kemudian di sisteminasi dan diatur untuk kemudian dituangkan ke dalam kelembagaan-kelembagaan yang disahkan oleh Negara.

2. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, timbul klasifikasi atau *basic institution* dan *subsidiary institution*. *Basic institution* dianggap sebagai Kelembagaan Kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, Misalnya keluarga, sekolah-sekolah, negara dan lain sebagainya dianggap sebagai *basic institution* yang pokok. Sebaliknya adalah *subsidiary institution* yang dianggap kurang penting seperti misalnya kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Ukuran apakah yang di pakai untuk menentukan suatu Kelembagaan Kemasyarakatan yang dianggap sebagai *basic* dan *subsidiary*, berbeda di masing-masing masyarakat. Ukuran-ukuran tersebut juga tergantung dari masa hidup masyarakat tadi berlangsung. Misalnya sirkus pada zaman Romawi dan Yunani Kuno dianggap sebagai *basic institution*; pada dewasa ini kiranya tak akan dijumpai suatu masyarakat yang masih mempunyai keyakinan demikian.
3. Dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan *approved* atau *social sanctioned-institution* dan *unsanctioned institution*. *Approved* atau *social sanctioned-institution* adalah kelembagaan-kelembagaan yang diterima masyarakat seperti misalnya sekolah, perusahaan dagang dan lain-lain. Sebaliknya adalah *unsanctioned institution* yang ditolak oleh masyarakat, walau kadang-kadang masyarakat tidak berhasil memberantasnya. Misalnya kelompok penjahat, pemeras, pencolong dan sebagainya.
4. Pembedaan antara *general institution* dengan *restired institution* timbul apabila klasifikasi tersebut di dasarkan pada faktor penyebarannya, Misalnya agama merupakan suatu *general institution* karena dikenal oleh hampir semua

masyarakat dunia. Sedangkan agama-agama islam, protestan, katolik budah dan lain-lainnya merupakan *restriced institution*, oleh karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia ini.

5. Sudut fungsinya terdapat perbedaan *aperative institution* dan *regulative institution*. Yang pertama berfungsi sebagai kelembagaan yang bersangkutan seperti misalnya kelembagaan industrialisasi. Yang kedua, bertujuan untuk mengawasi adat-istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi kelembagaan itu sendiri. Suatu contoh adalah kelmbagaan-kelembagaan seperti kejaksaan, pengadilan dan sebagainya.

Di dalam pasal 1 poin (6) pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dijelaskan bahwa Kelembagaan Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah kelmbagaan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan mayarakat.

Selanjutnya dalam pasal 12 di uraikan fungsi Kelembagaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipatif, serta swadaya gotong royong masyarakat;

- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat, dan;
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Untuk penjelasan yang lebih rinci mengenai Kelembagaan Kemasyarakatan, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan pasal 1 poin (1) menjelaskan Kelembagaan Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang merupakan mitra Pemerintah Desa atau Lurah dalam memberdayakan masyarakat. Adapun jenis-jenis Kelembagaan Kemasyarakatan dijelaskan pada pasal 7 Peraturan Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan yang terdiri dari :

- a. Kelembagaan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) Kelembagaan Ketahanan Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan lain;
- b. Kelembagaan Adat;
- c. Tim Penegak PKK Desa/Kelurahan;
- d. RT/RW;

- e. Karang Taruna, dan
- f. Kelembagaan Kemasyarakatan lainnya.

Kelembagaan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) Kelembagaan Ketahanan Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Kelembagaan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) Kelembagaan Ketahanan Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta;
- d. Pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;

- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat. lembaga adat mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat-istiadat serta hubungan antara tokoh adat dengan pemerintah Desa dan Lurah. Kelembagaan adat mempunyai fungsi :
 - a. Penampungan dan penyaluran pendapat aspirasi masyarakat kepada pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan persilihan yang menyangkut hukum, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
 - b. Pemberdayaan pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat dalam memperkaya budaya masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah Desa dan Lurah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan
 - c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desadan Lurah.
RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa atau Lurah dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintah RT/RW mempunyai fungsi :
 - a. Pendataan Kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. Memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antara warga;
 - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, dan;
 - d. Penggerak swadaya gotong-roryong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Karang Taruna mempunyai tugas menggalangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Karang Taruna mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungan secara swadaya;
- h. Penyelenggaraan rujukan, pendamping dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;

- j. Penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan Kelembagaan Kemasyarakatan lainnya di Desa yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Kelembagaan Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan yang di akui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peaturan Daerah Kabupaten/Kota.

8.Konsep/Teori Manajemen Pemerintahan

Manajemen menurut G.R Terry dalam buku *prinsiples of manajement*, merupakan suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusai dan sumber-sumber lainnya (dalam Permadi, 2010:11)

Dalam Sunyoto, (2012:3) Stoner dan Freeman Manajemen adalah proses perencanaan, berorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian supaya organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.Menurut Prajudi, manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari pada sektor serta seumber dayayang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu parpta atau tujuan kerja tertentu (dalam Ndraha, 2007:268).

Adapun fungsi-fungsi manajement Hendry Foyal (1916) antara lain :

1. Planning (perencanaan);
2. Organizing (pengorganisasia);

3. Commanding (pengarahan);
4. Coordinating (koordinasi);
5. Controlling (pengawasan).

Stoner menjelaskan kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok (dalam Pasolong, 2013:4).Kepimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok (Permadi, 2010:12).

Teori kepemimpinan (Kartono, 2011:31-32) adalah pengeneralisasian satu seri perilaku pemimpin dan konsep konsep kepinpinannya dengan menonjolkan latar belakang historis, sebab-musabab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, sifat-sifat utama pemimpin, tugas pokok dan fungsi nya, serta etika profesi kepemimpinan. Pasolong, (2013:5) Konsep kepemimpinan adalah (cara atau teknik = gaya) yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi pengikut atau bawahannya dalam melakukan kerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam Pasolong,(2013:5) Kemudian Kartono mengatakan kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha kooperati mencapai tujuan yang sudah direncanakan.

Kemudian fungsi kepemimpinan Nawawi, et.al (2004:75-81) adalah :

1. Fungsi intruktif;
2. Fungsi konsultatif;
3. Fungsi partisipatif;

4. Fungsi delegasi; dan
5. Fungsi pendedalian.

Sedangkan kepemimpinan menurut Moekijat adalah :

- a. Seorang pemimpin adalah seseorang yang membimbing dan mengarahkan/menjuruskan orang-orang lain.
- b. Seorang pemimpin adalah seseorang yang dapat mengarahkan orang-orang lain untuk mengikuti jejaknya.
- c. Seorang pemimpin adalah seseorang yang berhasil menimbulkan perasaan ikut bertanggung jawab, kepada orang-orang bawahannya, terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan dibawah pimpinannya (dalam Permadi, 2010:10).

Menurut Hicks dan Gullet mengatakan pimpinan yang aktif mampu memberikan pengarahan terhadap usaha semua pekerja dan pencapaian birokrasi (dalam Pasalong, 2013:20).

Adapun tugas pemimpin menurut Stoner adalah :

1. Pemimpin bekerja dengan orang lain, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satu dengan atasannya, staf, teman, sekerja atau atasan lain dalam organisasi sebaik orang di luar organisasi;
2. Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggung jawabkan (akuntabilitas), seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi untuk mencapai outcome yang terbaik, pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan stafnya tanpa kegagalan;
3. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas, proses kepemimpinan dibatasi sumber jadi pemimpin harus dapat menyusun tugas

dengan mendahulukan prioritas dalam upaya pencapaian tujuan pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf, kemudian pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif dan menyelesaikan masalah secara efektif;

4. Pemimpin harus berfikir secara analitis dan konseptual, seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dalam konseptual. Selanjutnya dapat mengindefikasi masalah dengan akurat, pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain;
5. Manajer adalah seorang mediator, konflik salah satu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator (penegahan);
6. Pemimpin adalah politisi dan diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasinya;
7. Pemimpin membuat keputusan yang sulit, seorang pemimpin harus dapat memecahkan masalah.

Sedangkan menurut Kartono (2005:62) fungsi pemimpin adalah :

1. Memprakarsai struktur organisasi;
2. Menjaga adanya koordinasi dan integrasi organisasi;
3. Merumuskan tujuan institusional atau organisasional dan menentukan sarana dan cara-cara yang efisien untuk mencapai tujuan;
4. Mengenai pertentangan dan konflik-konflik yang muncul dan mengadakan evaluasi;
5. Mengadakan revisi, perubahan, inovasi pembangunan dan penyempurnaan organisasi.

Kepimpinan yang efektif hanya akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan fungsinya. Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam hidupan kelompok/organisasi, oleh karena itu fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial.

9. Teori Organisasi

Menurut pendapat Moekijat, (2005:6) organisasi adalah kerangka di dalam mana orang-orang bertindak dan organisasi mengandung pengertian adalah penyusunan tenaga kerja dan pembagian tugas-tugas. Mengorganisasi adalah menyusun bagian-bagian sedemikian rupa sehingga seruluhnya bekerja sebagai suatu badan yang disatukan. Kelangsungan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari adanya peranan dari segenap anggota organisasi yang mampu melaksanakan tugasnya sehingga dapat dikatakan bahwa anggota organisasi merupakan salah satu sumber daya manusia yang mendukung kelangsungan suatu organisasi. Organisasi merupakan suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuanhierarkiotoratis dan tanggung jawab, tercapainya efektifas pelaksanaan tugas sebagai bidang organisasi tentunya tidak terlepas dari proses pengorganisasi.

10.Pelayanan Publik

Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut Wasistiono (2001:51-52) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah

atau pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

Menurut Moenir (2003:82) terdapat beberapa faktor pendukung pelayanan yang penting, yaitu :

- a. Faktor kesadaran petugas yang berkecimpung dalam pelayanan, kesadaran disini berfungsi sebagai acuan dasar yang melandasi pada perbuatan atau tindakan yang berikutnya.
- b. Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan yaitu merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang.
- c. Faktor organisasi yang meliputi pengaturan struktur organisasi yang menggambarkan hierarki pertanggungjawaban, pembagian kerja yang berdasarkan keahlian dan berfungsi masing-masing bagian sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan serta pengembangan organisasi.
- d. Faktor pendapatan yang meliputi gaji yang dapat mengairahkan semangat kerja yang tinggi.
- e. Faktor kemampuan dan keterampilan kerja dapat ditingkatkan dengan pemberian bimbingan dan petunjuk kerja mengadakan pendidikan dan pelatihan khusus pegawai.
- f. Faktor sarana dan pelayanan yang meliputi peralatan, perlengkapan dan juga tersiapnya fasilitas pelayanan yang meliputi gedung dengan segala kegiatannya fasilitas komunikasi dan fasilitas lainnya.

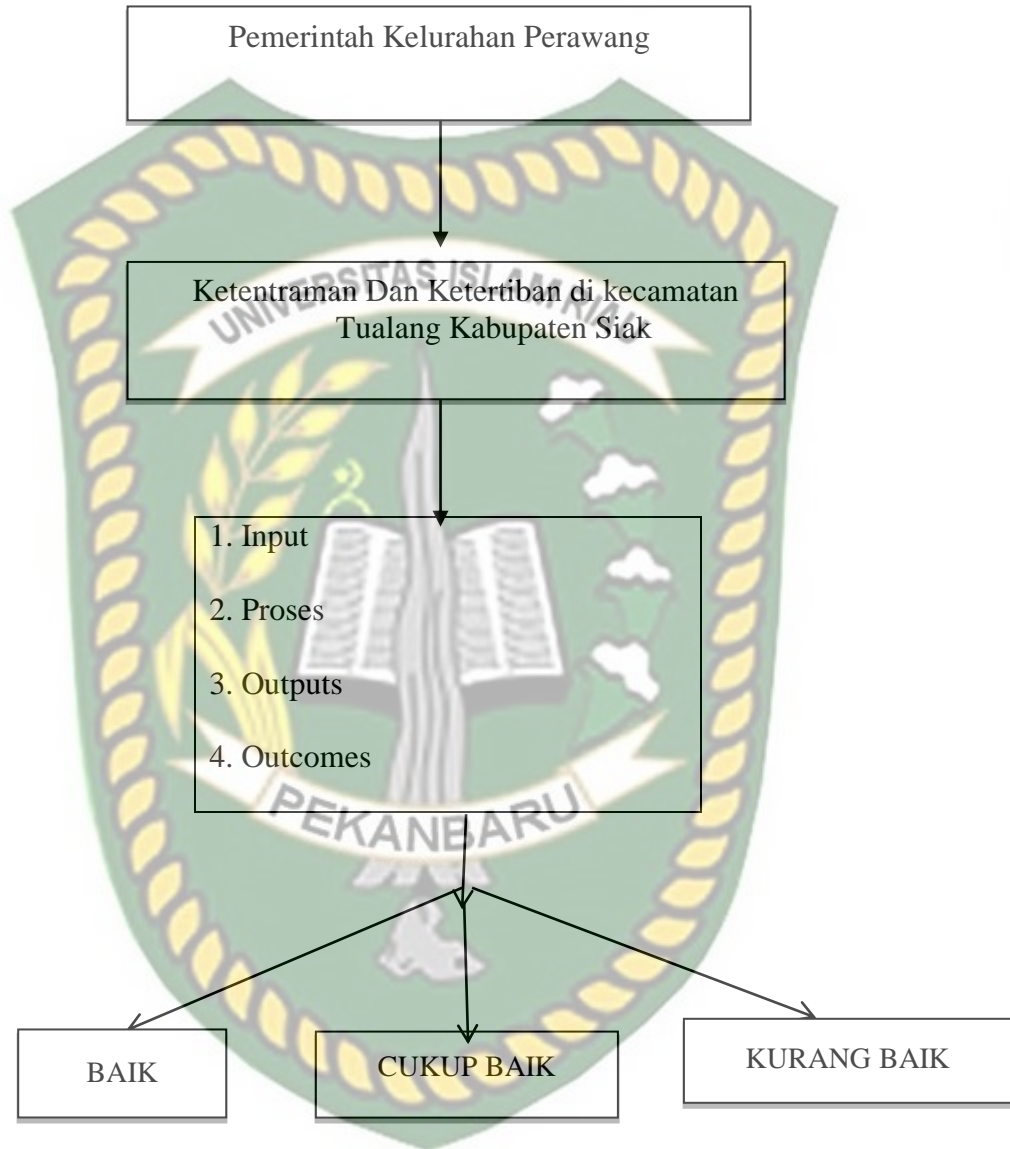
Pelayanan akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila adanya kerja sama antara pihak yang melayani dengan pihak yang dilayani guna dapat memenuhi kebutuhan masing-masing.

Adapun pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, kelompok orang dan organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan, (Pasolong, 2008:128).Selanjutnya menurut Wasistiono, (2003:41) bahwa memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah tugas pokok pemerintah yang penting. Oleh sebab itu, organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai pelayanan masyarakat (*public servant*).

B. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran ini adalah untuk membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan meneliti masalah yang dihadapi serta mekanisme hubungan Kelembagaan sehubungan dengan penelitian ini.

Gambar I.1. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kampung Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2019



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2020

C. Konsep Operasional

Adapun konsep-konsep yang di operasionalkan dalam penelitian ini Untuk menghindari salah penafsiran persepsi atas istilah yang digunakan maka diberikan konsep yang di operasionalkan sebagai berikut :

1. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
2. Pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia
3. Evaluasi adalah penilaian secara menyeluruh dari sebuah usaha atau kegiatan meliputi *input, proses, outputs dan outcome*, melalui evaluasi dapat di ketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak.
4. Evaluasi kebijakan adalah sebagai kegiatan fungsional yaitu evaluasi kegiatan dipandang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri .
5. Fungsi merupakan kegiatan rutin organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi dan mengenai pembagian tugas serta di bagian mana suatu organisasi tersebut memiliki karakteristik bidang tertentu.
6. Evaluasi pelaksanaan fungsi lurah yang dimaksudkan disini ialah untuk melihat kinerja kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh Kelurahan Kampung Perawang dan juga digunakan untuk menilai sejauh mana ke efektifan kebijakan publik serta sejauh mana tujuan yang telah dicapai.
7. Fungsi adalah manfaat yang dapat diberikan terhadap sesuatu hal dalam hal ini adalah pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Kelurahan Perawang Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

8. Fungsi lurah sebagaimana di dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan yaitu :

- Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan,
- Pemberdayaan masyarakat,
- Pelayanan masyarakat,
- Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum,
- dan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan.

9. Kelurahan dalam penelitian ini adalah wilayah kerja lurah sebagai

10. Perangkat-Perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.

11. lembaga Kemasyarakatan adalah suatu sistem tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas dalam masyarakat

12. lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan adalah kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan Mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat. lembaga Kemasyarakatan dalam penelitian ini adalah lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan RT/RW di Kelurahan Perawang Kecamatan Siak.

13. Pembinaan lurah yang dimaksud pembinaan lurah adalah serangkaian kegiatan pembinaan berupaya pembimbingan, pengarahan, pendidikan dan latihan serta pemberian penghargaan oleh lurah terhadap RT/RW yang ada di Kelurahan Kampung Perawang Kecamatan Siak.

14. Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi.
15. Pembinaan sebagai suatu proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan peningkatan, pertumbuhan, evaluasi, atas berbagai kemungkinan, berkembang atau suatu hal.
16. Pembinaan dalam penelitian menurut Santoso (1995:60) pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain penyuluhan, pengarahan, bimbingan.
17. Input adalah pada penilaian apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang di perlukan untuk melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan telah cukup memadai.
18. Proses adalah bagaimana sebuah usaha pembinaan lembaga kemasyarakatan tersebut dilaksanakan langsung kepada masyarakat.
19. Outputs (hasil) adalah penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem proses usaha khususnya pembinaan lembaga Kemasyarakatan telah di selenggarakan.
20. Outcomes (dampak) adalah mefokuskan diri pada dampak yang di terima oleh masyarakat luas atau pada pembinaan lembaga kemasyarakatan pada usaha tersebut.

D. Operasional Variabel

Tabel II.1. Operasi Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kampung Perawang Kecamatan Siak Kabupaten Siak

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
<p>Kebijakan Publik adalah dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi,</p> <p>keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor, sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iksandar, 2012)</p> <p>Evaluasi adalah suatu proses yang mendasar dari pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau</p>	<p>Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Di Kelurahan Kampung Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak</p>	<p>1. Input</p> <p>2. Proses</p>	<p>Program-program Pembinaan serta melaksanakan program yang dibuat</p> <p>Mengevaluasi program dari hasil tersebut dan melaksanakan kegiatan Dan Mengumpulkan data setiap penyelenggara pemerintahan desa.</p>	<p>Nominal</p> <p>Normal</p>

1	2	3	4	5
program yang telah di rencanakan dengan Evaluasi dapat di ketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan (Nurcholis, 2005:169)		3.Outputs.	Kegiatan yang di lakukan atau di ikuti oleh semua anggota RT dan RW di berikan secara tertulis. serta kegiatan dapat menerima	Nominal
		4.Outcome	dengan mengerti giatan tersebut antara pembimbing dan yang di bimbing. dampak terhadap pemerintah. Dampak terhadap masyarakat.	Nominal

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2019

E. Teknik Pengukuran

Untuk mempermudah menganalisa data, maka penilaian terhadap pelaksanaan variable atau indikator dibagi dalam tiga tingkatan atau variasi, adapun penilaian tersebut adalah : baik, cukup baik, kurang baik.

Untuk melihat hasil pelaksanaan fungsi lurah dalam pembinaan lembaga Kemasyarakatan maka dibuat pengukuran variable sebagai berikut :

Baik :Apabila semua indikator Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Di Kelurahan Kampung

Perawang Kecamatan Siak Kabupaten Siak, telah menjalankan indikator yang ada atau Jawaban responden pada kategori baik 81%-100%

Cukup Baik : Apabila penilaian indikator Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Di Kelurahan Kampung Perawang Kecamatan Siak Kabupaten Siak telah menjalankan dua hingga tiga indikator yang ada atau jawaban reponden pada kategori cukup baik 34%-80%

Tidak Baik :Apabila penilaian indikator Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Di Kelurahan Kampung Perawang Kecamatan Siak Kabupaten Siak hanya menjalankan satu indikator Yang ada atau jawaban reponden pada kategori kurang baik 1%-33%
Selanjutnya pengukuran yang diberikan masing-masing indikator penilaian adalah sebagai berikut :

1. Input

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada ≥ 67 -100%

Cukup Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori 34-66%

Tidak Baik : Apabila setiasp indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada ≤ 1 -33%

2. Proses

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada $\geq 67 -100\%$

Cukup Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori 34-66%

Tidak Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada $\leq 1-33\%$

3. Outputs

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada $\geq 67 -100\%$

Cukup Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori 34-66%

Tidak Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada $\leq 1-33\%$

4. Outcomes

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada $\geq 67 -100\%$

Cukup Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori 34-66%

Tidak Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada $\leq 1-33\%$

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ini yaitu tipe Survey Deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengaktifkan dan menganalisa sehingga dapat diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi dengan demikian maka penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena pertimbangan bahwa kantor lurah merupakan perangkat daerah yang cukup penting dan berperan dalam pembinaan lembaga Kemasyarakatan RT/RW sehingga sesuai data dilapangan mengenai pembinaan terhadap RT/RW terlihat masih banyak permasalahan-permasalahan dilapangan.

B. Populasi dan Sampel

1. . Populasi

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari obyek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. (Bungin,20113:109)

2. Sampel

Sedangkan sampel adalah sebagian populasi yang menjadi nara sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian wakil dari populasi yang di teliti.

Tabel III.1. jumlah data Populasi dan Sampel

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Lurah	1	1	100%
2.	Sekretaris Lurah	1	1	100%
3.	RT/RW	18	18	100%
Jumlah		20	20	

Sumber : Kantor Kelurahan Perawang, 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini teknik penarikan Sampel yang digunakan ada dua teknik yaitu teknik sensus karena jumlah populasi aparatur pemerintah tergolong kecil yaitu 1 Lurah dan 1 Sekretaris Lurah, dan RT/RW, selanjutnya teknik purposive sampling yang mana teknik penarikan berdasarkan tujuan dan alasan tertentu. Penelitian mengambil dan membatasi sampel RT sebanyak 18 orang yang mana dapat mewakili keseluruhan populasi dan mengetahui tentang permasalahan penelitian, sehingga jumlah keseluruhan sampel 20 orang.

F. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

merupakan suatu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, kuisisioner, observasi dan dokumentasi. Berupaya identitas responden dan tanggapan responden tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

2. Data Sekunder

adalah data yang telah tersedia, diperoleh dengan membaca Laporan-laporan, Peraturan-peraturan, dan buku-buku yang telah ada pada kantor Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi (pengamatan) Yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung pada lokasi penelitian, unuk mendapatkan informasi mengenai Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
2. Interview (wawancara) Yaitu wawancara langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian ini.

3. Angket/Kuesioner Yaitu memberikan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk diisi oleh responden yang diharapkan dapat memberikan jawaban atau informasi sehubungan dengan masalah penelitian.
4. Dokemntasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat Dokumen-dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

H. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Survey deskriptif, dimana setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan analisa dengan menggunakan analisis kuantitatif, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan uraian kemudian di analisa selanjutnya diambil kesimpulan.

I. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Tabel: III.2 Jadwal penelitian Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

No	Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu Ke-																				
		Juni 20				juli'20				Agust 20'				sept'20				Okt 20				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP	■	■	■																		
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Revisi Kuisisioner																					
5	Rekomendasi Survay																					
6	Survey Lapangan																					
7	Analisis Data																					
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																					
9	Konsultasi Revisi Skripsi																					
10	Ujian konferehensif Skripsi																					
11	Revisi Skripsi																					
12	Pengadaan skripsi																					

Sumber: modivikasi penelitian 2019

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini akan dibahas dalam enam (6) BAB, dimana antara pembahasan tiap-tiap BAB mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis dan, konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal pelaksanaan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada BAB ini akan memuat tentang diskripsi lokasi penelitian, meliputi : visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan yang diteliti.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini akan berisi mengenai identitas responden, hasil penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB terakhir ini merupakan penutup yang akan berisi kesimpulan dan saran



BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah singkat Kelurahan perawang

Tualang yang menurut asal katanya adalah Tuah Alang, merupakan salah satu kecamatan bagian dari kabupaten Siak Sri Indra Pura. Kecamatan Tualang ini terletak di wilayah kabupaten Siak Provinsi Riau yang lokasinya berjarak 60 KM dari Pekanbaru. Kecamatan Tualang Merupakan pemekara dari kecamatan Siak yang dimekarkan menjadi 14 kecamatan yaitu, Kecamatan Siak, Kerinci Kanan, Tualang, Dayun, Sungai Apit, Minas, Kandis, Mempura, Sabak Auh, Bunga Raya, Koto Gasib, Mandau, Pusoko dan Lubuk Dalam.

Sebelum Tualang menjadi suatu Kecamatan , daerah ini masih tergabung dengan Kecamatan Siak dan Kabupaten Bengkalis, Seiring dengan pesatnya pertumbuhan Industri menjadi tujuan bagi perantau bebagai daerah yang tentunya mejadi pesat pula sehingga menurut pemerintah usat daerah ini desa Tualang yang paling padat penduduknya berdasarkan dari pusat data statistik, penduduk desa Tualang enam belas ribu empat ratus jiwa dengan tiga ribu lima ratus kepala keluarga yang didomosi oleh perantau berbagai daerah, presentase penduduk tempatan dengan penduduk perantau dari berbagai daerah, persentase penduduk tempatan denga penduduk perantau sekitar antara 30% berbanding 70%(BPS Kab Siak, Profil kecamatan Tualang Tahun 2013)

Tidak banyak sejarah pasti yang mengutarakan berdirinya kota ini namun kalau bisa kita tinjau awal permulaan kota ini berasal dari sebuah dusun tepi sungai siak (Desa Perawang) dan semakin berkembang seiring berdirinya perusahaan SURYA DUMAI & IKPP. Saat ini perawang sudah berkembang menjadi sebuah kota industri dengan asilitas penduduknya antara lain Gadjah Tunggal Square hingga persada indah Square.

B. Gambaran Umum kelurahan perawang

Keadaan Georafis

Kota Perawang terletak antara $0^{\circ}32' - 0^{\circ}51'$ Lintang utara dan $101^{\circ}28' - 101^{\circ}52'$ Bujur timur di pinggir sungai siak, ketinggian 0,5-5dpl dengan suhu udara sekitar 22°C sampai 33°C dan Dengan Luas Keseluruhan 373,75 KM Bujur Timur. Kecamatan Tualang terdiri dari delapan Desa dan satu Kelurahan yaitu Tualang, Tualang Timur, Pinang Sebatang, Pinang Sebatang Timur, Pinang sebatang Barat, Maredan, Maredan Barat, dan Kelurahan Perawang.

Wilayah Perawang seperti umumnya wilayah kabupaten Siak lainnya terdiri dari dataran rendah dengan struktur tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan gley humas dalam bentuk tanah rawa-rawa atau tanah basah. Bentuk wilayahnya 75% datar sampai berbukit dan 25% berbukit.

Letaknya lebih kurang 1 jam menuju ibu kota provinsi (Pekanbaru) dan 1,5 jam menuju ibu kota kabupaten (Siak Sri Indra Pura).

Wilayah lain yang berbatasan sebagai berikut :

Utara : Kecamatan Mndau, Minas.

Timur : Kecamatan Sei Mndau, Kecamatan Koto Gasib.

Selatan: Kecamatan Kerinci kanan, Pekanbaru.

Barat : Kecamatan Minas.

Perawang secara umum berada pada daerah dataran dimana sektor industri pengelolaan merupakan motor penggerak perekonomian yang sangat dominan tidak saja bagi perawang sendiri tapi juga menjadi sektor andalan kabupaten siak. Sehingga tidak berlebihan apabila daerah ini disebut daerah industri

C. Ekonomi Dan Masyarakat

Di kota ini terdapat pabrik kertas PT. Indah Kiat yang merupakan anak perusahaan sinar mas Group. PT Indah Kiat merupakan pabrik kertas dan bubur kertas utama di Indonesia. Pabrik ini telah memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat dan sekitarnya baik langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung. Namun ada juga yang berprofesi sebagai nelayan karena letak desa perawang dekat dengan sungai.

Setelah masuk perusahaan besar seperti CALTEX, IKPP sangat membantu pertumbuhan desa perawang, hingga saat ini pertumbuhan perawang berkembang dengan baik ditandai dengan banyaknya pembangunan yang semakin merata.

D. PENDIDIKAN

Kota seiring pertumbuhan penduduknya juga tumbuh menjadi pusat pendidikan bagi kawasan sekitarnya. Berikut daftar sekolah yang terdapat di kota perawang. Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat dari label berikut :

Tabel IV.1 Jumlah sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Tahun	Jumlah
1	TK	2019	16
2	SD	2019	34
3	SMP Negeri	2019	10
4	SMP Swasta	2019	11
5	SMA	2019	7
6	SMK	2019	6
	JUMLAH		84

Sumber, Kelurahan Perawang 2019

E. Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Perawang

1. Susuna organisasi

Perangkat Pemerintahan Kelurahan, jumlah keseluruhannya adalah 14 orang dengan perincian :

- A. Lurah : 1
- B. Sekretaris Lurah : 1
- C. Bendahara : 1
- D. Kasi Pemerintahan : 2
- E. Kasi Kementrian & Ketertiban Umum : 3

F. Kasi Pemberdayaan & kesejahteraan Masyarakat : 6

2. Kedudukan Dan Tugas

Kependudukannya : sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

A. Lurah

Tugas :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah secara umum, pembinaan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembinaan pembangunan fisik dan non fisik
2. Melaksanakan koodinasi terhadap jalan pemerintahan
3. Melaksanakan tugas dari pemerintahan atasannya.
4. Melaksanakan Tugas dalam rangka pembinaan kententraman dan ketertiban
5. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab dibidang pembangunan dan kemasyarakatan.

C. Sekretaris Lurah

Tugas :

1. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan.
2. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

3. Merumuskan dan melaksanakan pemberian pelayanan stakepada kepala kelurahan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kelurahan
5. Merumuskan dan melaksanakan tugas dan fungsi kepala kelurahan apabila kepala keulahan berhalangan melaksanakan tugas

C.Seksi pemerintahan

Tugas :

1. Merumuskan dan melaksanakan serta menyelenggarakan pendataran atau pencatatan penduduk termasuk orang asing.
2. Merumuskan dan melaksanakan serta mengikuti, mengumpulkan dan mempersiapkan laporan tentang kependudukan termasuk orang asing
3. Merumuskan dan melaksanakan serta mempersiapkan ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian aparat pemerintahan kelurahan
4. Merumuskan dan melaksanakan serta mengumpulkan dan mempersiapkan data pengembangan dan kegiatan kelurahan
5. Merumuskan dan melaksanakan sertamengumpulkan data laporan tentang kegiatan dan melaksanakan pemilihan umum
6. Merumuskan dan melaksanakan penyelenggaraan kerjasama antar kelurahan

D. Seksi Umum

Tugas :

1. Merumuskan dan melaksanakan dan mempersiapkan urusan kegiatan keamanan kedalam terhadap personil

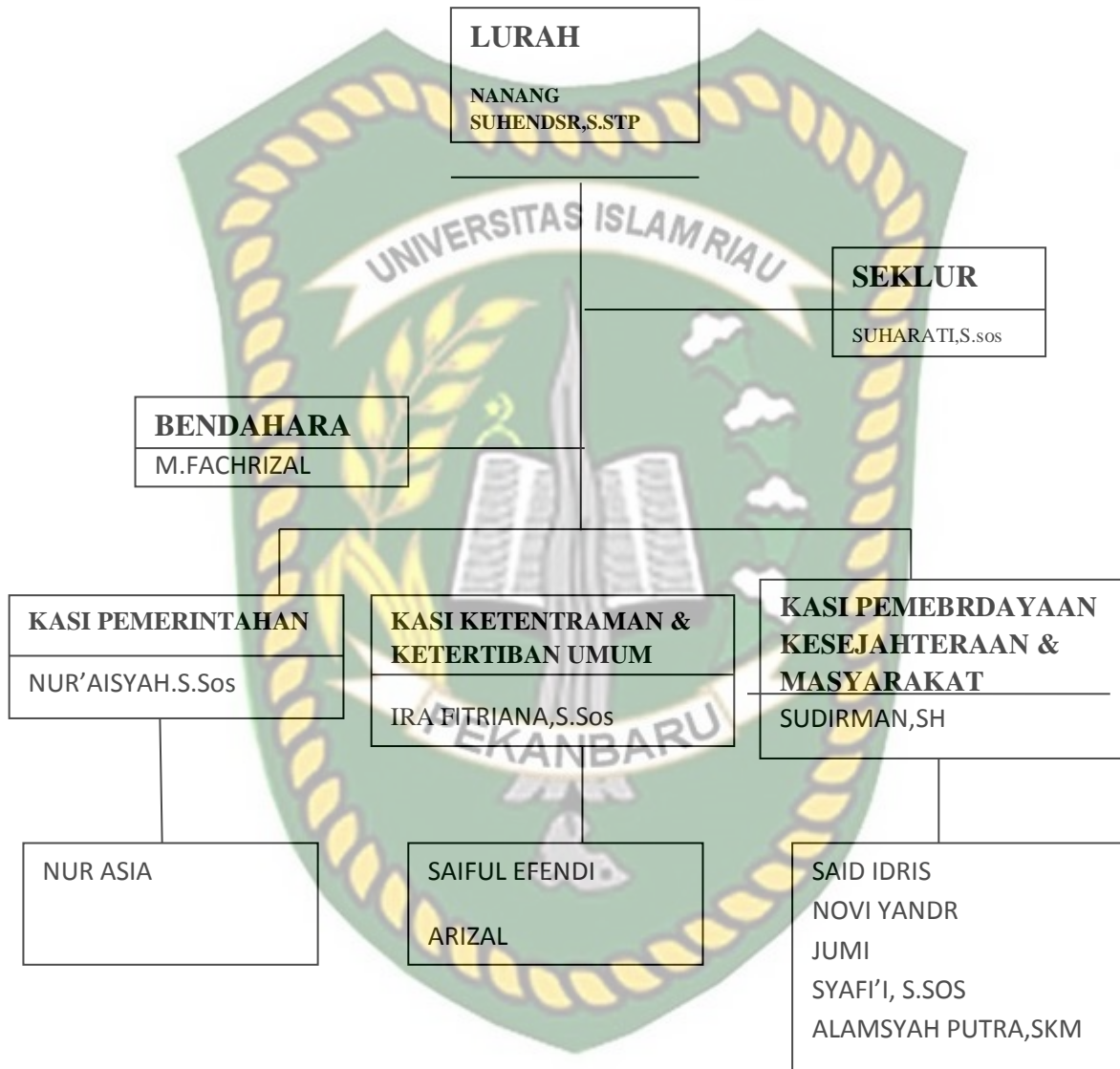
2. Merumuskan melaksanakan hubungan dengan lembaga masyarakat
 3. Merumuskan dan melaksanakan tata usaha penerimaan kelurahan dan PBB
 4. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan urusan tata usaha, urusan rumah tangga sekretariat kelurahan
- E. Seksi pembebrdayaan dan kesejahteraan masyarakat

Tugas :

1. Merumuskan dan melaksanakan rencana menggerakandan mengkoodinir kegiatan peningkatan kesejahteraan
2. Merumuskan melaksanakan serta mengumpulkan data yang berhubungan dengan penderita cacat
3. Meumuskan dan melaksanakan serta menkoordinir pelaksanaan di bidang keluarga berencana dan peningkatan mutu gizi makanan masyarakat
4. Merumuskan dan melaksanakan serta mendorong kegiatan masyarakat di bidang pendidikan olah raga dan sosial budaya serta keagamaan
5. Membantu tugas Lurah maupun sekretaris Lurah alam menjalankanroda pemerintahan maupun dalam pembangunan

BAGAN VI.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kelurahan

Perawang.



Sumber, Kantor Lurah Perawang 2019

BAB V

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

a. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan cara untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bertujuan akan terciptanya keserasian dalam melakukan pekerjaan untuk lebih jelasnya maka dapat di lihat tingkat pendidikan dari pada aparat pemerintah pada tabel berikut:

Tabel V.I.Tingkat Pendidikan Responden Di Kelurahan Perawang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTA	15	33%
2	S.1	5	67%
	Jumlah	20	100%

Sumber, kelurahan Perawang 2020

Dari tabel tersebut diketahui bahwa tingkat pendidikan aparat pemerintah bervariasi, yaitu yang memiliki pendidikan paling dominan adalah SLTA yang berjumlah 1 orang atau (33%) dan S.1 2 orang atau (67%)

b. Masa kerja responden

Masa kerja bagi seorang pegawai sangat mempengaruhi kinerjanya karena dengan masa kerja yang baik maka tingkat pengalaman yang mereka miliki akan semakin baik pula selanjutnya disini dapat kita lihat masa kerja dari parat kelurahann Perawang yaitu:

Tabel V.2 Masa Kerja Responden

No	Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1	1-5 Tahun	13	33%
2	6-10 Tahun	7	67%
	Jumlah	20	100%

Sumber:kantor kelurahan Perawang 2020

Dengan melihat tabel di atas maka diketahui bahwa masa kerja dari respinder aparat kelurahan Perawang pada umumnya memiliki masa kerja antara 1-10 tahun yaitu sebanyak 20 orang.

B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Penyelenggaraan pemerintah selain bertujuan melaksanakan program pembangunan dan pelayanan pada masyarakat disatu sisi menjadi tanggung jawab pemerintah namun pada sisi lain sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah saling

bergandeng tangan dalam memikul tanggung jawab dalam mensejahterakan,masyarakat.

Masalah sumber daya manusia mendapat perhatian secara khusus,terutama yang berkaitan dengan kualitas,sikap dan tingkah laku,dengan kualitas dan kinerja yang tinggi maka berbagai potensi yang ada dalam masyarakat dapat di manfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan maka bertumpu kepada bagaimana pimpinan dan bawahan dapat bekerja secara baik.dimana dalam hal ini pihak pimpinan harus mampu memotifasi dalam meningkatkan semangat dan gairah kerja.seandainya motifasi dalam meningkatkan semangat dan gairah kerja pegawai tidak sesuai dengan yang di inginkan,tentu saja akan berakibat tidak baik pada perkembangan tugas atau kemajuan organisasi pemerintah tersebut,kalau saja PNS tidak berkualitas dalam bekerja tentu saja tugas dan tanggung jawab,yang diembankan pemerintah menimbulkan kerugian bagi pemerintah dan masyarakat.

Sehubungan dengan itu maka melalui dalam pasal 5 peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan ini pemerintah menetapkan tugas lurah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintah
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan prasarana dan fasilitas umum
5. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Maka selanjutnya disini akan di uraikan secara terperinci mengenai Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang yaitu.

1. Penyuluhan

Suatu rencana kerja yang baik rentu harus diawali dengan berbagai informasi terutama dari mereka yang akan di jadikan objek dari pembangunan itu sendiri. hal ini diperlukan bila pembangunan untuk masyarakat maka keinginan masyarakatlah yang harus di jadikan acuan bagi penyusunan berbagai program pembangunan kelurahan. menyadari tingkat pengetahuan masyarakat kelurahan relatif rendah karena itu pembinaan dari lurah sangat diperlukan terutama melalui pembinaan atau bimbingan bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan.

Sehubungan dengan proses pemberian bimbingan berdasarkan temuan di lapangan lurah Perawang telah melakukannya. berdasarkan wawancara dengan pihak kelurahan diperoleh informasi bahwa pemerintah kelurahan telah memberikan bimbingan berupa petunjuk, kemudian mendorong dan mengiring tujuan dari lembaga-lembaga yang mereka kelola seperti RW/RT.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responder yang mengola lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan Perawang tersebut maka penillaian terhadap jawaban mereka dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel V.3 Tanggapan Responder Tentang Penyuluhan

No	Sub indikator	Kategori pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak baik	
1.	Adanya pemberian keterampilan dan pendidikan	5	12	3	20
2.	Adanya pemberian latihan	4	13	3	20
	Jumlah	9	25	6	40
	Rata-rata	5	12	3	20
	Persentase	25%	60%	16%	100%

Sumber, olahan penelitian 2020

Dari berbagai tanggapan responder lembaga kemasyarakatan yang ada bahwa pemberian bimbingan yang di lakukan oleh lurah Simpang Baru terhadap 20 repondenyang mengola lembaga kemasyarakatan RT/RW sebanyak 9 orang atau (25%) dikategorikan baik .dari 20 orang tersebut sebanyak 5 orang adalah anggota RW/RT dimana mereka menyatakan bahwa lurah Simpang Baru telah memberikan petunjuk dalam bekerja seperti dalam pendataan

penduduk, pengamanan lingkungan dan kegiatan kemasyarakatan . selanjutnya dari 20 orang responden yang terkategori jawabannya baik sebanyak 5 orang adalah pengurus RT/RW dimana mereka, juga menyatakan bahwa lurah Simpang Baru telah memberi petunjuk, mendorong dan mengiring mereka untuk membuat program-program kerja. selanjutnya dari 20 orang responden pengurus lembaga kemasyarakatan RT/TW yang terkategori baik sebanyak 5 orang adalah anggota RT/RW dimana mereka juga merasakan lurah Simpang Baru telah juga mendorong dan mengiring RT/RW Perawang untuk selalu aktif membina keamanan dan ketertiban di kelurahan Perawang.

Sementara itu dari 20 orang responden yang terkategori baik tersebut sebanyak 9 orang adalah ketua. RW dan RW dimana mereka merasakan bahwa Lurah Perawang juga mendorong dan mengiring RT/RW untuk senantiasa cukup baik menciptakan rasa aman dan tertib dalam masyarakat. Berdasarkan wawancara penulis dengan Lurah Perawang (26 September 2019) di peroleh informasi bahwa Lurah Perawang melakukan pemberian petunjuk mendorong dan mengiring karena dengan berperannya lembaga. Masyarakat RT/RW itu dengan baik maka tugas-tugas lurah sebagian akan terbantu oleh lembaga masyarakat tersebut.

Selanjutnya juga di ketahui bahwa tanggapan dari berbagai dari berbagai responden lembaga kemasyarakatan RT/RW yang ada menunjukkan bahwa pemberian bimbingan yang di lakukan oleh Lurah Perawang terhadap 20 responden yang mengola berbagai lembaga kemasyarakatan RT/RW sebanyak 12 orang atau (60%) di kategorikan cukup baik. dari 12 orang tersebut sebanyak 4 orang adalah anggota RT/RW dimana mereka menyatakan bahwa. Lurah Perawang kadang-kadang dalam waktu tertentu ada memberikan petunjuk dalam melakukan suatu pekerjaan seperti dalam penyusunan program kegiatan RT/RW dan keputusan kelurahan serta juga mendorong serta

menggerakkan mereka untuk bekerja sesuai dengan tugas-tugas yang di emban oleh RT/RW.

Kemudian dari 12 orang responden yang rekategori cukup baik sebanyak 3 orang adalah pengurus RT/RW dimana mereka juga menyatakan bahwa lurah Perawang kurang dalam memberi petunjuk, mendorong dan mengiring mereka untuk membuat program-program kerja ,baik dalam bentuk bulanan maupun program kerja tahunan. Mereka menyatakan lurah hanya memberi petunjuk pelatihan kepengurusan .

Selanjutnya dari 12 orang responden pengurus lembaga kemasyarakatan yang terkategori cukup baik sebanyak 5 orang adalah anggota RT/RW dimana mereka juga merasakan Lurah Simpang Baru saja memberikan petunjuk terutama mengenai kegiatan RT/RW, penyusun program-program kerja RT/RW serta mendorong RT/RW Simpang Baru aktif.

Sementara itu dari 35 orang responden yang terkategori cukup baik sebanyak 10 orang adalah ketua RW dan RT dimana mereka merasakan bahwa Lurah Perawang sangat jarang dan hampir tidak pernah memberi mereka petunjuk terutama tentang kedudukan dan peran mereka sebagai pimpinan masyarakat dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan sosial yang terjadi ataupun yang akan terjadi dimasa akan datang.

Dari tabel V.3 diatas terlihat bahwa tanggapan berbagai responden yang ada bahwa pemberian bimbingan yang di lakukan oleh Lurah Perawang terhadap 20 responden yang mengola berbagai lembaga kemasyarakatan RT/RW sebanyak 6 orang atau (16%) dikategorikan tidak baik. Dari 6 orang tersebut sebanyak 3 orang adalah anggota RT/RW dimana mereka menyatakan bahwa Lurah Perawang tidak ada memberikan petunjuk pada mereka dalam menjalankan maupun melakukan suatu kegiatan seperti dalam penyusunan program kelurahan. Kemudian sebanyak dari 6 orang responden yang terkategori tidak baik tersebut sebanyak 3 orang adalah pengurus RT/RW dimana mereka juga menyatakan bahwa lurah Perawang tidak pernah memberi

petunjuk, mendorong dan mengiring mereka untuk membuat program-program kerja. selanjutnya dari 6 orang responder pengurus lembaga kemasyarakatan RT/RW baik dalam penyusunan program-program kerja maupun dalam mengiring PKK Perawang untuk selalu aktif membina keamanan dan ketertiban di kelurahan Perawang.

Sementara dari itu 6 orang responden yang terkategori tidak baik sebanyak 5 orang adalah ketua RW dan RT dimana mereka merasakan bahwa lurah Perawang tidak pernah memberi mereka petunjuk terutama tentang persoalan-persoalan sosial.

Dari observasi yang penulis lakukan di atas serta hasil wawancara dengan Lurah Simpang Baru bahwa baiknya pemberian penyuluhan ini karena lurah telah ada melakukan kegiatan memberikan petunjuk pada lembaga kemasyarakatan dalam bekerja, sedangkan yang menyatakan cukup baik bahwa lurah tidak sempat untuk melakukan petunjuk program pada lembaga kemasyarakatan RT/RW secara terus-menerus karena lurah masih ada kerjaan yang lebih penting maka biasanya di serahkan pada sekretaris Lurah, sedangkan yang tidak baik di sebabkan lurah telah ada memeberikan petunjuk namun petunjuk yang di berikan belum memadai atau optimal karena hanya di lakukan sekali dalam setahun sedangkan hasil wawancara dengan RT/RW diketahui bahwa Lurah Perawang kadang-kadang dalam, waktu tertentu ada memberikan petunjuk dalam melakukan suatu pekerjaan seperti dalam penyusunan program kegiatan RT/RW maka dengan demikian dapat di simpulkan bahwa pemberian bimbingan terhadap lembaga organisasi kemasyarakatan RT/RW Kelurahan Perawang di kategorikan “tidak baik” atau pada persentase 0%-33%.

2. Pengarahan

Dalam melakukan pembinaan selain melakukan bimbingan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Perawang maka seharusnya lurah juga memberikan pengarahan terhadap setiap lembaga kemasyarakatan. hal ini bertujuan agar setiap lembaga kemasyarakatan. hal ini bertujuan agar setiap lembaga yang ada dapat bekerja secara optimal sehingga beban pembangunan tidak saja di pikul oleh pemerintah kelurahan tapi juga oleh masyarakat.

Sehubungan dengan pemberian proses pemberian pengarah berdasarkan temuan di lapangan lurah Perawang telah melakukannya. Berdasarkan wawancara dengan pihak kelurahan di peroleh informasi bahwa pemerintah kelurahan telah memberikan pengarah berupa arahan, petunjuk pemberian langkah-langkah terhadap, berbagai lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti RW/RT, yang ada di wilayah kelurahan Perawang, kemudian untuk mengetahui tanggapan responden yang mengelola lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di di kelurahan Perawang apakah mereka mendapat pengarahan dari lurah

Perawang Jawaban Mereka Dapat Dilihat Seperti Pada Tabel Berikut Ini

Tabel V.4 Tanggapan Responden Tentang Pengarahan

No	Sub indikator	Kategori pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak baik	
1.	Pemberian arahan dan petunjuk	9	8	3	20
2.	Pemberian langkah-langkah	3	13	3	20
	Jumlah	12	21	6	40
	Rata-rata	6	10	4	4
	Persentase	30%	50%	20%	100%

Sumber, olahan penelitian 2020

Dari tanggapan berbagai responden lembaga kemasyarakatan RT/RW yang ada bahwa pembenaan pengarahan yang di lakukan oleh Lurah Perawang terhadap 20 responden yang mengelola berbagai lembaga kemasyarakatan RT/RW sebanyak 12 orang atau (30%) dikategorikan baik. dari 12 orang tersebut sebanyak 6 orang adalah anggota RT/RW dimana mereka menyatakan bahwa lurah Perawang telah memberikan arahan pada RT/RW dalam bekerja seperti dalam penyusunan jumlah penduduk serta juga memberikan petunjuk dan langkah-langkah pada mereka untuk bekerja sesuai dengan tugas-tugas RT/RW

Selanjutnya dari 12 orang responden yang terkategori baik tersebut sebanyak 1 orang adalah pengurus RT/TW dimana mereka juga menyatakan bahwa Lurah Perawang telah memberi pengarahan, petunjuk dan langkah-langkah untuk membuat program-program kerja RT/RW. Kemudian dari 12 orang responden pengurus lembaga kemasyarakatan RT/RW yang terkategori baik sebanyak 6 orang adalah anggota RT/RW dimana mereka juga merasakan lurah perawang telah memberi pengarahan dan petunjuk terutama mengenai cara-cara penyusunan program-program kerja RT/RW tingkat kelurahan. Sedangkan dari 6 responden yang terkategori baik tersebut sebanyak 4 orang adalah ketua RW dan RT dimana mereka merasakan bahwa Lurah Perawang pernah memberi mereka pengarahan dan petunjuk terutama tentang tugas mereka sebagai pimpinan masyarakat dan mereka juga diberi petunjuk terutama tentang tugas mereka sebagai pimpinan masyarakat dan mereka juga di beri petunjuk, tentang menanggulangi keamanan lingkungan dan pencegahan penyakit masyarakat.

Seiring dengan tanggapan responden diatas juga berdasarkan wawancara penulis dengan Lurah Perawang tanggal 26 September 2019 diperoleh informasi bahwa lurah simpang baru melakukan pemberian pengarahan dan petunjuk, dan langkah-langkah karena dengan berperannya lembaga kemasyarakatan RT/RW itu dengan baik tugas-tugas lurah sebagian akan terbantu oleh lembaga kemasyarakatan tersebut.

Selanjutnya dari data tabel V.4 tersebut juga dapat diketahui bahwa tanggapan dari berbagai responden lembaga kemasyarakatan tentang pemberian pengarahan yang di lakukan oleh Lurah Perawang terhadap 20 responden yang mengelola berbagai lembaga kemasyarakatan, dimana sebanyak 10 orang atau (50%) dikategorikan cukup baik. dari 10 orang tersebut sebanyak 5 orang adalah

anggota RT/Rw dimana mereka menyatakan bahwa lurah Perawang dalam waktu tertentu ada memberikan pengarahan untuk melakukan sesuatu. Pekerjaan seperti penyusunan kegiatan RT/RW kelurahan dan untuk bekerja sesuai dengan tugas-tugas yang di kembangkan oleh RT/RW

Selanjutnya dari 10 orang responden yang terkategori cukup baik sebanyak 5 orang adalah petugas karang taruna dimana mereka juga menyatakan bahwa Lurah Perawang

Selanjutnya dari 100 orang responden yang terkategori cukup baik sebanyak 3 orang adalah petugas karang taruna dimana mereka juga menyatakan bahwa Lurah Simpang Baru kurang dalam memberikan pengarahan untuk membuat program-program hanya diberikan tidak diberikan secara berkelanjutan. Dan dari 10 orang responden pengurus lembaga kemasyarakatan RT/RW yang terkategori cukup baik sebanyak 5 orang adalah anggota RT/RW, penyusunan program-program kerja RT/RW. Sementara itu dari 10 orang responden yang terkategori tidak baik sebanyak 6 orang adalah ketua RW dan RT dimana mereka merasakan bahwa lurah simpang baru sangat jarang dan hampir tidak pernah memberikan pengarahan tentang kedudukan RT/RW sebagai pimpinan masyarakat terutama dalam menyelesaikan setiap persoalan sosial.

Dari tanggapan berbagai responden lembaga kemasyarakatan yang ada bahwa memberikan pengarahan yang dilakukan oleh lurah Perawang terhadap 20 responden yang mengelola berbagai lembaga kemasyarakatan sebanyak 6 orang atau (20%) dikategorikan tidak baik. dari 6 orang tersebut sebanyak 4 orang adalah anggota RT/RW dimana mereka menyatakan bahwa Lurah tidak

ada memberikan pengarahan dalam menjalankan dan melakukan suatu kegiatan seperti dalam penyusunan perencanaan pembangunan. kemudian sebanyak 4 orang adalah pengurus RT/RW dimana mereka juga menyatakan bahwa Lurah pernah memberikan pengarahan untuk membuat dan menyusun program-program kerja yang dilakukan setiap tahunnya.

Dari 6 orang responden pengurus lembaga kemasyarakatan yang terkategori tidak baik sebanyak 4 orang adalah anggota RT/RW dimana mereka juga merasakan Lurah Simpang Baru tidak pernah memberikan pengarahan terutama mengenai bagaimana menyusun program kerja RT/RW sementara itu dari 13 orang responden yang terkategori tidak baik sebanyak 8 orang adalah ketua RW dan RT dimana mereka merasakan bahwa Lurah Simpang Baru tidak pernah memberi pengarahan tentang kedudukan mereka sebagai pimpinan di tengah masyarakat.

Sedangkan hasil wawancara dengan RT/RW diketahui lurah simpang baru tidak ada memberikan pengarahan dalam menjalankan dan melakukan suatu kegiatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Kemudian sebanyak 4 orang adalah pengurus RT/RW dimana mereka juga menyatakan bahwa lurah perawang tidak pernah memberikan pengarahan untuk membuat dan menyusun program-program yang dilakukan setiap tahunnya.

Dari hasil observasi penulis lakukan di atas serta hasil wawancara dengan lurah simpang baru dapat oleh lurah simpang baru, bahwa pemberian pengarahan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan RT/RW di kelurahan simpang baru “Tidak Baik” atau pada persentase 0%-33%.

3. Bimbingan

Masalah sumber daya manusia mendapatkan perhatian secara khusus, terutama yang berkaitan dengan kualitas, sikap dan tingkah laku. Dengan kualitas dan kinerja yang tinggi maka profesionalisme dapat di tingkatkan

selanjutnya tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Masalah sumber daya manusia, sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek, yakni kuantitas dan kualitas. kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia (penduduk) yang kurang penting kontribusinya dalam, pembangunan, dibandingkan dengan aspek kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa. sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut, yang menyangkut kemampuan ,bai kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik (kecerdasan,mental).

Untuk menentukan siapa yang melakukan penilaian dalam proses pengukuran kinerja merupakan masalah dalam proses penilaian kinerja. Karena penetapan penilaian ini erat sekali hubungannya dengan persoalan apakah hasil penelitian objektif atau tidak. Penilaian memang penting bagi pencapaian tujuan tugas-tugas pekerjaan pengembangan individu dalam kelompok kerja, dan penting bagi segala bentuk program peningkatan kerja melalui pelatihan dan penyuluhan.

Pendidikan dan pelatihan dalam suatu organisasi sebagai salah satu upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, merupakan suatu siklus yang harus dilakukan secara terus-menerus. Karena organisasi baru berkembang, untuk mengantisipasi perubahan di luar organisasi, untuk itu maka kemampuan sumber daya manusia dalam suatu organisasi harus terus-menerus di tingkatkan seiring dengan kemajuan dan perkembangan organisasi ,maka dari itu dapat dilihat disini tugas dari lurah dalam melakukan pembinaan yang dilihat dari indikator memberikan pelatihan dan pendidikan yang terdiri dari

- 1) Adanya keterampilan
- 2) Adanya pemberian pendidikan
- 3) Adanya pemberian latihan

Dari informasi yang diperoleh maka dapat dilihat tanggapan responden yang terdiri dari berbagai lembaga kemasyarakatan, maka dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Sub indikator	Kategori pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak baik	
1.	Adanya upaya menunjuki dan mengiring	5	12	3	20
2.	Adanya upaya mendorong	4	13	3	20
	Jumlah	7	25	9	40
	Rata-rata	5	12	3	20
	persentase	25%	60%	16%	100%

Sumber:Olahan Penelitian 2020

Berdasarkan tanggapan berbagai responden dari lembaga kemasyarakatan RT/RW yang ada bahwa pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh lurah simpang baru terhadap 20 responden yang mengelola berbagai lembaga

kemasyarakatan sebanyak 7 orang atau (25%) dikategorikan baik. dari 7 orang tersebut sebanyak 5 orang adalah anggota RT/RW dimana mereka menyatakan bahwa lurah simpang baru telah memberikan pendidikan dan pelatihan dalam bekerja seperti diklat mengenai kepemimpinan dan diklat administrasi. kemudian dari 20 orang responden yang terkategori baik sebanyak 7 orang adalah pengurus RT/RW dimana mereka juga menyatakan bahwa lurah simpang baru telah memberikan pendidikan dan pelatihan pada mereka untuk membuat program-program kerja dan melakukan setiap pekerjaan yang ada. Selanjutnya dari 7 orang pengurus lembaga kemasyarakatan RT/RW yang terkategori baik sebanyak 5 orang adalah anggota RT/RW dimana mereka juga merasakan lurah simpang baru telah memberikan pendidikan dan latihan terutama mengenai setiap kegiatan RT/RW, penyelenggaraan program kerja. Sementara itu dari 20 orang responden yang terkategori baik sebanyak 7 orang adalah ketua RT/RW dimana lurah simpang baru pernah memberikan pendidikan dan latihan sebagai pimpinan, yang merupakan sebagai kaki tangan pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan dari pemerintah kepada masyarakat. Seiring dengan tanggapan responden diatas juga berdasarkan wawancara penulis dengan lurah memberikan pendidikan dan latihan kepada lembaga kemasyarakatan itu dengan baik tugas-tugas lurah yang mana sebagian akan terbantu oleh lembaga kemasyarakatan RT/RW yang ada.

Selanjutnya juga diketahui tanggapan dari berbagai responden lembaga kemasyarakatan yang ada bahwa memberikan pendidikan dan latihan yang dilakukan oleh lurah simpang baru 20 responden yang mengelola berbagai lembaga kemasyarakatan sebanyak 12 orang atau (60%) dikategorikan cukup

baik.dari48 orang tersebut sebanyak 5 orang adalah anggota RT dan RW dimana mereka menyatakan bahwa lurah hanya dalam waktu tertentu memberikan pendidikan dan latihan mengenai suatu pekerjaan seperti dalam penyusunan administrasi kelurahan. Selanjutnya dari 20 orang responden yang terkategori cukup baik sebanyak 4 orang adalah pengurus RT dan RW dimana mereka juga menyatakan bahwa lurah kurang dalam memberikan pendidikan dan latihan pada mereka yang bertujuan untuk mengaktifkan setiap kegiatan organisasi yang ada agar berjalan dengan sebaik mungkin.

Selanjutnya dari 20 orang rersponden pengurus lembaga kemasyarakatan yang terkategori cukup baik sebanyak 12 orang adalah,anggota RT dan RW dimana Mereka juga merasakan lurah simpang baru sangat jarang memberikan pendidikan dan latihan mengenai kegiatan organisasi RT dan RW, serta mengenai penyusunan dan pembuatan program-program kerja RT dan RW. Sementara itu dari 20 orang responden yang terkategori cukup baik sebanyak 2 orang adalah ketua RW dan RT dimana mereka merasakan bahwa lurah simpang baru hanpir tidak pernah memberikan pendidikan dan latihan terutama tentang bagaimana cara menghadapi masyarakat yang sangat beraneka ragam jenisnya serta mengenai diklat kepemimpinan.

Dari tanggapan berbagai responden lembaga kemasyarakatan RT/RW yang ada bahwa.memberikan pendidikan dan latihan yang di lakukan oleh Lurah Simpang Baru terhadap 20 responden yang mengelola berbagai lembaga kemasyarakatan sebanyak 9 orang atau (16%)dikategorikan tidak baik dari 6 orang tersebut 3 orang adalah anggota RT/RW dimana mereka juga menyatakan

Lurah Simpang Baru tidak pernah memberikan pendidikan mengenai bagaimana meningkatkan keamanan dan ketertiban yang ada di Kelurahan Perawang.

Sementara itu dari 3 orang responden yang terkategori tidak baik sebanyak 2 orang adalah ketua RT dan RW dimana mereka, merasakan bahwa lurah simpang baru tidak pernah memberikan pendidikan dan latihan terutama tentang kedudukan mereka sebagai pemimpin masyarakat dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat, sedangkan hasil wawancara dengan LPM diketahui bahwa lurah simpang baru tidak ada memberikan pendidikan dan latihan pada mereka dalam menjalankan dan melakukan satuan kegiatan.

Dari kegiatan observasi penulis diatas serta hasil wawancara dengan lurah simpang baru dapat disimpulkan bahwa kegiatan lurah dalam memberi pendidikan dan latihan terhadap lembaga kemasyarakatan RT/RW kelurahan simpang baru dapat di kategorikan “cukup baik” atau pada persentase 34%-66%. Dari (3) indikator mengenai evaluasi pelaksanaan tugas lurah dalam pembinaan dalam lembaga kemasyarakatan di kelurahan simpang baru kecamatan tampan selanjutnya dari analisa yang telah di buat diatas maka dapat ditarik rekapitulasi dari jawaban reponden tersebut yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.6 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Dikelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

No	Sub indikator	Kategori pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak baik	
1.	Penyuluhan	9	25	6	20
2.	Pengarahan	12	21	7	20
3.	Bimbingan	7	25	9	20
	Jumlah	18	46	22	60
	Rata-rata	20	31	11	20
	Persentase	33%	48%	18%	100%

Sumber, olahan penelitian 2020

Dengan melihat tabel rekapitulasi jawaban responden sesuai dengan teknik pengukuran yang telah di buat ternyata 33% berada pada interval 0%-33% dengan kategori “tidak baik”. diatas mengenal evaluasi pelaksanaan tugas lurah dalam pembinaan lembaga kemasyaeakatan dikelurahan simpang baru kecamatan tampan maka dapat di kategorikan tidak baik hal ini terlihat dari tanggapan responden yang ada dari 20 responden maka yang terkategori cukup

baik ada sebanyak. 31 responden atau 48% dan terkategori tidak baik sebanyak 11 orang atau 18%.

C. Faktor-Faktor Hambatan Lurah Dalam Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Dalam menjalankan tugasnya ini banyak hambatan yang di hadapi oleh lurah terutama dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan.yang berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan lurah dan seksi pemerintahan pada tanggal 26 agustus 2019 yang antara lain yaitu:

- a) Tidak dipahaminya intruksi yang diberikan lurah seperti intruksi mengenai penanganankebersihan dan keamanan yg selalu di salah artikan oleh RT/RW yang ada. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan ronda malam namun hanya di laksanakan selama satu minggu saja.
- b) Tidak tersedianya dana khusus untuk membeli dan membuat buku petunjuk bagi lembaga kemasyarakatan. Sebagian buku petunjuk yang ada adalah buku yang lama sehingga perkembangan ilmu dengan memakai metode baru tidak dapat diberikan pada pengurus RT/RW dan tentunya hal ini akan menghambat kinerja lembaga-lembaga yang ada di kelurahan simpang baru
- c) Sulitnya mengumpulkan RT/RW pada suatu waktu pelatihan dan bimbingan karena masing-masing mereka mempunyai kepentingan kerja yang beda satu dengan yang lainnya.

BAB VI

PENUTUP

A. kesimpulan

1. Diketahui evaluasi pelaksanaan tugas lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan Perawang kecamatan tualang maka dapat di kategorikan tidak baik yang di lihat dari antara lain pemberian bimbingan yang di lakukan lurah belum berjalan dengan baik karena tidak dilakukan secara rutin dan dalam memberikan pengarahannya masih ada pengarahannya yang kurang di mengerti oleh lembaga kemasyarakatan sehingga arahan yang di sampaikan tidak sesuai tidak maksimal jadinya, serta dalam memberikan pendidikan dan pelatihan selanjutnya dalam memberi intruksi-intruksi tidak jelasnya intruksi yang di sampaikan sehingga sering salah penerimaan oleh RT dan RW dan mengenai adanya literatur/buku lurah tidak ada memberikan buku petunjuk baru tetap menggunakan yang lama juga
2. Dalam menjalankan tugas ini banyak hambatan yang di hadapi oleh lurah terutama dalam melakukan pembinaan terhadap RT/RW yang antara lain yaitu: kurangnya sarana dan prasarana seperti gedung pertemuan untuk mengadakan pendidikan dan latihan bagi seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada hal, tidak dipahaminya intruksi yang di berikan oleh lurah oleh lembaga kemasyarakatan yang di sebabkan rendahnya pemahaman dari

anggota lembaga yang ada,tidak tersedianya dan khusus untuk membeli dan membuat buku petunjuk bagi RT/RW sehingga hanya bisa mengguna buku yang lama saja

B. Saran

1. Sebaiknya lurah selaku kepala pimpinan di wilayahnya dapat memberikan pembinaan yang lebih baik pada setiap lembaga kemasyarakatan yang ada terutama dengan memberikan pendidikan dan latihan pada setiap anggota yang ada
2. Dianjurkan tingkat kemampuan anggota lembaga kemasyarakatan agar dapat lebih baik dalam memahami setiap intruksi yang disampaikan oleh lurah guna menjalankan setiap kegiatan yang ada.
3. Sebaiknya lurah dapat menyediakan atau mengadakan buku pedoman.baru guna penyesuaian terhadap perubahan zaman yang berlaku

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

- Awang, Azam dan Mendra Wijaya. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru. Alaf Riau.
- Bungin, burhan 2013. *Metodelogi penelitian kuantitatif* jakarta, kencana pranada medi Gruup
- Dwiyanto Agus.2015. *Menejemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta.gadjah Mada Uneversity Prees
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Haibuan Malayu, SP. Drs. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Askara, Jakarta
- Hayat. 2017. *Menejemen Pelayanan Publik*. PT Raja Grafindo .Depok
- Khotami. 2016. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rajawali Pres.
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik*. Bandung. Indra Prahasta.
- Nazir, Moh. Ph. D. “*Metode Penelitian*”. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999
- Ndaha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Mathis, Jackson. 2000. *Manajmen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Riduwan, 2007, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Alfabeta Bandung.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV.

Alfabeta, Bandung

Sitorus, Monang. 2009. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung. Unpad Press

Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Ilmu pemerintahan*. Jakarta. Bumi Aksara.

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.

Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Bumi Aksara.

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Ekologi Pemerintahan*. Bandung. Pustaka Reka Cipta.

Wicaksono, Widya, Kristian. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan*.

Yogyakarta. Graha Ilmu.

